

Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif



Untuk **Tingkat Lanjut**



MODUL

**Sekolah Kader
Pengawas Partisipatif**

TINGKAT LANJUT

**Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
2021**

**Sekolah Kader Pengawas Partisipatif:
untuk Tingkat Lanjut**

Pengarah

Abhan
M. Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab

La Bayoni
Asmin Safari Lubis

Penulis

Moh. Maskurudin Hafid
Safina
M. Ihsan
Zaid Muhammad
Deytri R. Aritonang
Masmulyadi

Editor

Ichal Supriadi

Disain & Layout

Shofie Ahmadi

Kata Pengantar

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat.

Ucapan Terimakasih khususnya kami sampaikan kepada para penyusun modul khususnya Ichal Supriadi, Direktur Asia Democracy Network (ADN) yang telah berkontribusi dan mendukung terwujudnya modul dan pelaksanaan SKPP Lanjut ini. Semoga modul ini dapat memaksimalkan terselenggaranya SKPP Tingkat Lanjut.

ABHAN

Ketua Bawaslu RI

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Pengantar | iii |
| Daftar Isi | v |
| Bagian I Pendahuluan | 1 |
| Bagian II Membangun Komitmen Belajar | 11 |
| Bagian III Membedah Demokrasi | 25 |
| Bagian IV Mempromosikan Demokrasi | 35 |
| Bagian V Memperjuangkan Demokrasi | 43 |
| Bagian VI Memperkuat Demokrasi Lokal | 53 |
| Bagian VII Review Materi Pelatihan dan Evaluasi | 57 |
| Bab VII IRencana Tindak Lanjut | 63 |

BAGIAN I

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu wajib mempunyai integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan pengawasan tahapan pemilihan umum.

Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada apatisme politik masyarakat. Apatisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Mengapa dapat terjadi? Dikarenakan salah satunya terjadinya kesenjangan antara elit politik dan masyarakat dan distorsi kepentingan manakala kebijakan politik tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang – undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat. Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Bawaslu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Berangkat dari pertimbangan diatas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas – komunitas masyarakat basis.

Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter

untuk menjadi kader demokratis.

Modul ini adalah tahap ketiga, atau disebut modul tingkat lanjut, dalam rangkaian sekolah kader pengawas pemilu partisipatif. Modul ini menjadi tahap akhir bagi kaderisasi kader untuk dapat melakukan relevansi antara pengetahuan kepemiluan dan demokrasi dengan praktik kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana mendidik kader untuk dapat melakukan praktik demokrasi secara substansial.

TUJUAN

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat

Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan

SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif

4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Dari SKPP diharapkan munculkan para kader yang dapat memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata. Melakukan pembelaan terhadap para korban kebijakan yang tidak adil dan tidak memihak terutama kepada kaum yang terpinggirkan. Nilai advokasi terhadap substansi demokrasi menjadi ujung tombak pada kader SKPP secara jangka panjang.

Hasil Yang Diharapkan

a) Jangka Pendek

Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

b) Jangka Panjang

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada

pemilu-pemilu selanjutnya sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat sepanjang tahapan pemilu dan pemerintahan.

Persiapan Pelatihan

Pelatihan akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai target apabila dilakukan persiapan yang matang. Persiapan pelatihan menyangkut penyelenggara, narasumber/ fasilitator, kurikulum pelatihan, metodologi pelatihan, peserta pelatihan, dan tempat pelatihan. Ada 3 (tiga) pelaku utama dalam pelatihan, yaitu :

1. Penyelenggara
2. Narasumber/ Fasilitator
3. Peserta

Tingkat partisipasi dan interaksi antar ketiga pelaku yaitu, penyelenggara, narasumber/ fasilitator, dan peserta sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggungjawab yang saling menunjang, bahkan ada pekerjaan yang menjadi tanggungjawab bersama antara penyelenggara dan narasumber/ fasilitator.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Penyelenggara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan pelatihan, meliputi :

1. Penentuan Narasumber dan Fasilitator

Jauh sebelum pelatihan penyelenggara harus menetapkan narasumber dan fasilitator yang berkompeten untuk mengisi dan memandu proses pelatihan. Diperlukan batasan yang jelas antara narasumber dan fasilitator. Dibanyak pelatihan, narasumber dan fasilitator sering dibedakan peran dan fungsinya, maka dalam pelatihan ini peran dan fungsi narasumber dan fasilitator relatif hampir sama.

Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi yang hampir sama, yang membedakannya adalah latar belakang keduanya.

Narasumber dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih/ memfasilitasi.

Dalam pelatihan Sekolah Kader pengawasan Pemilu Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria :

1. Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif

2. Memiliki pemahaman tentang Pembangunan Karakter
3. Memiliki pemahaman tentang Konstitusi dan Demokrasi
4. Memiliki pengetahuan tentang Kepemiluan
5. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat terpinggirkan

2. Penentuan Tempat Pelatihan

Penyelenggara juga harus menetapkan tempat pelatihan. Berhasil tidaknya pelatihan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor tempat pelatihan, karenanya perlu ditentukan tempat pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat pemilihan, antara lain :

- a) Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada ditengah keramaian)
- b) Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk *aktivitas outbond*)
- c) Aman dan nyaman
- d) Menerapkan protokol kesehatan

3. Rekrutmen Peserta (Anak Didik)

Peserta SKPP Tingkat Lanjut adalah:

1. Lulusan SKPP Tingkat Dasar dan Menengah.
2. Berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas

3. Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Diutamakan mampu berbahasa Inggris.
6. Diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan ditetapkan oleh Bawaslu RI

Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber/Fasilitator

1. Penentuan Metode Pelatihan

Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada kriteria peserta (anak didik) dimana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini.

Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton) dan memperbanyak alat peraga, sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas.

Beragam metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah, (2) *Brainstorming* atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) Penggunaan alat peraga

2. Penjajakan Kebutuhan Pelatihan

Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.

BAGIAN II

Membangun Komitmen Belajar

Sesi ini adalah materi yang disampaikan pada permulaan kegiatan pembelajaran. Diawali dengan ice breaking untuk mengurangi kekakuan antar peserta pelatihan, dilanjutkan dengan perkenalan sesama peserta kemudian membentuk pengurus kelas dan diakhiri dengan menyusun komitmen/kontrak belajar.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menghilangkan kekakuan, rasa canggung, saling mengenal sesama warga belajar, membentuk pengurus kelas serta tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi komitmen belajar.

Metode Pembelajaran

1. Ice Breaking
2. Perkenalan
3. Pengurus Kelas
4. Komitmen Belajar

Bahan/Alat Bantu

1. Label Nama (gantung)
2. Kertas Plano
3. LCD proyektor
4. Spidol
5. White board
6. Laptop
7. Power point presentation

Waktu

120 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan/Tema | Durasi |
|---------------------|---|-----------|
| Proses Pembelajaran | <p>1. Fasilitator memulai pembelajaran ini dengan sedikit tegur sapa dan keramahan yang wajar sambil menyatakan kepada semua peserta bahwa sebagai langkah awal dalam pembelajaran ini kita bersama akan mencermati peragaan (demonstrasi) sebuah kuis yang berjudul Gelar Kehormatan yang akan diperankan oleh 2(dua) dua orang fasilitator.(2 menit)</p> | 120 Menit |
| | <p>2. Sebelum memulai peragaan fasilitator melakukan penyamaan pemahaman tentang pengertian dari gelar kehormatan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengacu pada hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Panggilan untuk menghormati orang yang dituakan Panggilan kebangsawanan Panggilan yang menunjukkan keakraban Panggilan yang menunjukkan penguasaan bidang keilmuan Panggilan kekeluargaan, kesukuan dll | |
| | <p>3. Setelah ada kesamaan paham fasilitator menjelaskan kepada peserta beberapa aturan main dari kuis gelar kehormatan tersebut yaitu sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepasang pemeran (tim fasilitator) akan mengenakan Label nama (Gelar kehormatan) yang dipasang dipungggung masing-masing Gelar kehormatan yang dicantumkan memiliki 3 (tiga) kemungkinan saja yaitu, Nama He- wan, Nama Buah atau Nama Kota | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>c. Tugas keduanya adalah menemukan apa Gelar yang tercantum pada label Nama yang ada dipunggung masing-masing</p> <p>d. Kedua pemeran dibolehkan melihat Label Nama yang ada dipunggung pasangannya, namun mereka tidak boleh memberitahunya.</p> <p>e. Apabila kepada mereka ditanyakan tentang ciri-ciri dari Gelar yang tercantum dipunggung masing-masing, mereka hanya boleh menjawab dengan 3(tiga) macam jawaban saja yaitu Ya, Tidak dan Tidak tahu</p> <p>f. Kuis baru dinyatakan selesai apabila kedua pasangan telah dapat menebak gelar mereka masing-masing dengan benar tanpa melanggar aturan main dan dengan izin fasilitator yang memimpin baru boleh kembali ketempatnya semula</p> <p>4. Setelah semua peserta memahami aturan main, maka fasilitator mempersilahkan kedua fasilitator pemeran untuk memulai peragaan sampai selesai (10 menit)</p> <p>Acuan fasilitator:</p> <p>a. Kedua pemeran berdiri didepan kelas dalam posisi yang saling berhadapan dalam jarak 1 (satu) meter</p> <p>b. Pemeran pertama diberi label Nama Kota (Ranai)</p> <p>c. Pemeran kedua diberi label Nama Hewan (Ayam)</p> <p>d. Berikut jalannya komunikasi (hanya acuan fasilitator dan tidak untuk dibacakan):</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeran 1 : Apakah Gelar saya kelompok nama hewan? 2) Pemeran 2 : Tidak 3) Pemeran 1 : Apakah Gelar saya kelompok nama buah? 4) Pemeran 2 : Tidak 5) Pemeran 1 : Apakah Gelar saya kelompok nama kota? 6) Pemeran 2 : Ya 7) Pemeran 1 : Apakah kotanya adalah ibu-kota propinsi? 8) Pemeran 2 : Tidak 9) Pemeran 1 : Apakah kotanya adalah ibu-kota kabupaten? 10) Pemeran 2 : Ya 11) Pemeran 1 : Apakah kota kabupaten yang ada di pulau Jawa? 12) Pemeran 2 : Tidak 13) Pemeran 1 : Apakah kota kabupaten yang ada di pulau Sumatera? 14) Pemeran 2 : Ya 15) Pemeran 1 : Apakah kota itu berada di propinsi Lampung? 16) Pemeran 2 : Tidak 17) Pemeran 1 : Apakah kota itu berada di propinsi Sumatera Barat? 18) Pemeran 2 : Tidak 19) Pemeran 1 : Apakah kota itu berada di propinsi Kepulauan Riau? 20) Pemeran 2 : Ya 21) Pemeran 1 : Apakah kota itu berada di kabupaten Natuna? 22) Pemeran 2 : Ya 23) Pemeran 1 : Apakah kota itu Ranai? 24) Pemeran 2 : Ya, | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Fasilitator: Baiklah sekarang bergantian</p> <p>25) Pemeran 2 : Apakah Gelar saya kelompok nama kota?</p> <p>26) Pemeran 1 : Tidak</p> <p>27) Pemeran 2 : Apakah Gelar saya kelompok nama buah?</p> <p>28) Pemeran 1 : Tidak</p> <p>29) Pemeran 2 : Apakah Gelar saya kelompok nama hewan?</p> <p>30) Pemeran 1 : Ya</p> <p>31) Pemeran 2 : Apakah hewan itu berkaki empat?</p> <p>32) Pemeran 1 : Tidak</p> <p>33) Pemeran 2 : Apakah hewan itu bisa berenang?</p> <p>34) Pemeran 1 : Tidak tau</p> <p>35) Pemeran 2 : Apakah hewan itu biasa ditenakkan?</p> <p>36) Pemeran 1 : Ya</p> <p>37) Pemeran 2 : Apakah hewan itu halal bagi orang islam?</p> <p>38) Pemeran 1 : Ya</p> <p>39) Pemeran 2 : Apakah hewan itu Ayam?</p> <p>40) Pemeran 1 : Ya</p> | |
| | <p>5. Selesai peragaan fasilitator mengucapkan terimakasih kepada kedua pemeran, mempersilahkan kembali ketempat semula dan menyatakan bahwa kuis ini akan diikuti oleh semua peserta secara berpasangan, jika jumlah peserta ganjil maka akan digenapkan oleh anggota tim fasilitator atau petugas kelas. Bila perlu ulangi aturan main sampai semuanya jelas.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>6. Selanjutnya, Fasilitator mengatur posisi ruangan dan posisi semua peserta, memasang Label Nama dipunggung semua peserta, menentukan pasangan-pasangan dan sekali lagi mengingatkan bahwa kuis baru selesai bila kedua pasangan telah menemukan Gelarnya dengan benar, pasangan yang telah selesai harus mengangkat tangannya dan melaporkan ke Fasilitator, kemudian bila telah dibenarkan oleh Fasilitator boleh kembali ke tempat duduknya dan memasang gelar kehormatannya didepan dada.</p> | |
| | <p>7. Setelah waktu habis selama 20 menit kuis dihentikan, mereka yang belum dapat menyelesaikan tugasnya dihukum untuk menyanyi bersama, setelah itu baru boleh kembali ketempat duduknya dan memasang gelarnya didepan dada.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>8. Setelah semua peserta duduk kembali ke kursi masing-masing, fasilitator memimpin refleksi (perenungan) singkat yang mengacu pada beberapa pertanyaan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Apa yang anda rasakan pada saat melihat peragaan kuis oleh tim fasilitator tadi? Ceritakan (co fasilitator mencatat jawaban) Apa yang anda rasakan pada saat anda melaksanakan sendiri kuis tadi? Ceritakan (co fasilitator mencatat jawaban) Mengapa Anda merasa demikian? (mengacu pada catatan-catatan jawaban) Apakah ada manfaat (esensi belajar) yang diperoleh dari kuis tadi? Sebutkan (10 menit) <p>Catatan: Fasilitator harus sadar bahwa ia harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi peserta agar dapat mencairkan adanya batasan-batasan komunikasi dalam bentuk kebekuan psychis antara peserta dengan peserta, dengan fasilitator maupun dengan penyelenggara.</p> <p>Bentuk dari kebekuan psychis itu antara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasa malu; Sopan santun yang berlebihan; Formalitas yang kaku; Perasaan takut salah; Masa bodoh (acuh); Angkuh; Kurang percaya diri; Percaya diri berlebihan (over acting); dan Dll. | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>9. Setelah suasana kelas cukup kondusif, Fasilitator menyatakan bahwa saat ini pembelajaran bimtek telah kita mulai, materi pertama sesuai dengan jadwal adalah “Membangun Komitmen Belajar” untuk itu tadi kita telah mulai dengan sub pokok bahasan ice breaking atau mencairkan iklim belajar.</p> | |
| | <p>10. Selanjutnya agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai lebih efektif, maka terlebih dulu saya akan memperkenalkan diri. Kemudian tawarkan kepada peserta hal-hal apa saja yang perlu diperkenalkan, tetapi biasanya mengacu pada hal-hal berikut: (5 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pekerjaan Alamat Status keluarga Hoby dll | |
| | <p>11. Kemudian fasilitator menyatakan kepada peserta bahwa tampaknya semua peserta sudah saling kenal mengingat sudah sering adanya pertemuan, jadi sub pokok bahasan tentang perkenalan tampaknya tidak terlalu penting lagi untuk dilakukan. Namun sekedarnya mengingatkan bagi yang lupa marilah kita secara bergiliran kedepan kelas untuk menyebutkan nama dan daerah asal masing-masing. Setiap satu orang selesai fasilitator menukar Gelar kehormatannya dengan label Nama Peserta Bimtek. (10 menit)</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>12. Kemudian fasilitator menjelaskan bahwa dari proses perkenalan singkat tadi sedikit banyak kita sudah saling tahu pribadi masing-masing walaupun belum memadai untuk memilih seorang Ketua kelas, namun untuk kelancaran bimtek kita perlu menunjuk seseorang yang akan ditukan sebagai wakil peserta dan penghubung antara peserta dengan fasilitator dan antara peserta dengan panitya. Orang itu perlu kita pilih dan kita jadikan sebagai Ketua / Pengurus Kelas. (5 menit)</p> | |
| | <p>13. Fasilitator menawarkan teknik pemilihan antara lain secara aklamasi, musyawarah mufakat atau voting. Tetapi sebaiknya voting adalah pilihan terakhir jika sangat terpaksa. (10 menit)</p> | |
| | <p>14. Setelah Ketua atau Pengurus Kelas terpilih fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa dengan terpilihnya ketua atau pengurus kelas maka satu langkah maju telah dicapai dalam upaya pencapaian tujuan bimtek. Namun itu saja belum sempurna, masih perlu satu langkah lagi guna mencapai tujuan bimtek secara efektif yaitu perlu adanya aturan main dalam proses pembelajaran.</p> | |
| | <p>15. Fasilitator menjelaskan bahwa aturan main itu akan disusun dari, oleh dan untuk peserta dan aturan main itu tidak boleh bertentangan dengan pedoman Bimtek dan aturan itu biasanya disebut sebagai komitmen atau kontrak belajar.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>16. Kemudian fasilitator bertanya kepada peserta <i>apakah ada yang tahu tentang komitmen atau kontrak belajar?</i> Jika jawabnya ada minta yang bersangkutan untuk menjelaskan, namun jika tidak ada maka fasilitator harus menjelaskan bahwa komitmen atau kontrak belajar itu adalah <i>“sejumlah kesepakatan yang disusun oleh, dari dan untuk peserta bimtek dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran bimtek dengan efektif”.</i> (5 menit)</p> | |
| | <p>17. Setelah itu fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang komitmen atau kontrak belajar yang biasa dilakukan dalam kegiatan bimtek meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan waktu (on time) b. Dilarang merokok (No Smoking) c. Phones harus off atau minimal silent d. Rehat kopi (coffee break) e. Makan siang (lunch) f. Sanksi terhadap pelanggaran g. dll | |
| | <p>18. Fasilitator meminta kepada peserta untuk <i>menyusun 7 (tujuh) atau lebih komitmen</i> sebagai kontrak belajar <i>dipimpin oleh Ketua Kelas dalam waktu 10 (sepuluh) menit.</i> Jelaskan pula bahwa kesepakatan dibuat dan dituliskan <i>di kertas plano, lalu ditandatangani oleh semua peserta</i> dan ditempelkan di dinding kelas selama bimtek berlangsung.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>19. Setelah Komitmen belajar selesai ditandatangani dan telah ditempel di dinding kelas, fasilitator menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi peserta, lalu menyampaikan beberapa penegasan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan/janji, akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya adalah penerapan sanksi b. Kontrak/kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata) c. Komitmen /Kontrak Belajar ini juga membudayakan agar kita semua terbiasa mentaati undang-undang, apalagi kesepakatan/kontrak yang kita buat sendiri. d. Sebagai pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya tentu harus taat kepada Peraturan Perundang-undangan, | |
| | <p>20. Terakhir fasilitator mohon maaf jika ada kekhilafan kemudian menyampaikan kepada peserta bahwa sesudah ini pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi berikutnya, lalu menyampaikan salam dan menutup pembelajaran.</p> | |

NASKAH PEGANGAN 1
KUNCI JAWABAN GELAR KEHORMATAN PESERTA

| No | Kelompok Nama-Nama Hewan | No | Kelompok Nama-Nama Buah | No | Kelompok Nama-Nama Kota |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | AYAM | 1. | MANGGA | 1. | RANAI |
| 2. | HARIMAU | 2. | APEL | 2. | MERAUKE |
| 3. | KUCING | 3. | NANAS | 3. | TERNATE |
| 4. | ULAR | 4. | JERUK | 4. | BONTANG |
| 5. | BUAYA | 5. | RAMBUTAN | 5. | PARE-PARE |
| 6. | SEMUT | 6. | DURIAN | 6. | LAHAT |
| 7. | GAJAH | 7. | MANGGIS | 7. | SOFIFI |
| 8. | KANCIL | 8. | PISANG | 8. | POLEWALI |
| 9. | BEBEK | 9. | ANGGUR | 9. | MUNGKID |
| 10. | KERBAU | 10. | JAMBU | 10. | PRAYA |
| 11. | SAPI | 11. | KELENGKENG | 11. | MANGGARAI |
| 12. | KUDA | 12. | KIWI | 12. | TOBADAK |
| 13. | GARUDA | 13. | DUKU | 13. | WANGI-WANGI |
| 14. | ELANG | 14. | SAWO | 14. | KRAKSAAN |
| 15. | JERAPAH | 15. | SALAK | 15. | SANANA |

BAGIAN III

Membedah Demokrasi

Bagian ini peserta mendapatkan pemahaman tentang nilai dan norma inti dari konsep demokrasi, melakukan diskusi mendalam tentang tantangan dan peluang proses demokrasi serta dilema yang dihadapi oleh sistem demokrasi serta menanamkan nilai-nilai demokatis dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta memahami nilai dan norma inti demokrasi
2. Peserta mengkaji tantangan dan peluang bagi demokrasi
3. Peserta memahami dilemma yang terkait demokrasi
4. Peserta menciptakan demokrasi yang benar dan bernilai

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami konsep demokrasi dan prinsip maupun nilai terkait
2. Peserta mengetahui dilemma, tantangan, dan peluang dalam demokrasi
3. Peserta memahami demokrasi terhubung dengan konsep anti korupsi dan Pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan Kunci

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Seberapa besar keyakinan peserta terhadap demokrasi?
3. Dapatkah proses demokrasi dianggap sebagai sistem tata negara terbaik? Jika tidak, sistem lain apa yang dapat menggantikan?

Waktu

435 Menit

Proses Pembelajaran

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan/Tema | Durasi |
|---------------|---|-----------|
| Pengantar | <p>Fasilitator memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama. Dalam perkenalan ini Fasilitator dapat menggunakan permainan.</p> <p>Mengawali materi yang akan disampaikan, Fasilitator membagi dalam tiga kelompok. Dan masing-masing mendiskusikan dan menuliskan dalam kertas hasil diskusi kelompok tersedut dari pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator.</p> | 15 Menit |
| Diskusi | <p>Fasilitator bertanya kepada Peserta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda pahami tentang Demokrasi?2. Apakah Demokrasi merupakan sistem terbaik? Jika Iya kenapa, Jika Tidak. Kenapa.3. Jika bukan Demokrasi, sistem lain apa yang Anda dukung?4. Apakah Anda yakin demokrasi akan membawa Indonesia menjadi lebih baik? <p>Jawaban dikelompokkan sesuai dengan jenis jawaban dan didiskusikan dengan para peserta. Fasilitator kemudian menyimpulkan diskusi dengan kata kunci; demokrasi adalah otoritas pemerintahan sah yang dibentuk dari lembaga yang berisi warga negara, dengan berbagai latar belakang, gender, ras, agama, bangsa, etnis, identitas sosial, politik, dan lainnya.</p> | 120 Menit |

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Paparan 1 | <p>Fasilitator menjelaskan matriks demokrasi, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan sipil dalam pemerintahan bagi seluruh warga negara 2. Kesetaraan politik dan hukum serta partisipasi yang adil dalam keputusan politik 3. Kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah <p>Fasilitator menjelaskan prinsip demokrasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Pemilihan Rutin Bebas dan Adil 3. Penerimaan hasil Pemilu 4. Aturan Hukum 5. Kuasa Mayoritas dengan Hak Minoritas 6. Akuntabilitas 7. Transparansi 8. Hak-Hak Warga, Kebebasan dan Batasan Pemerintah 9. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan 10.Kebebasan Ekonomi 11.Kesetaraan 12.Hak Asasi Manusia 13.Pengadilan Independen 14.Partai Politik yang Bersaing | 135 Menit |
|-----------|---|--------------|

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| <p>Diskusi Kelompok</p> | <p>Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok untuk Memetakan Demokrasi. Setiap kelompok mendiskusikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja unsur penting demokrasi 2. Sebutkan hal-hal negatif dari demokrasi 3. Sebutkan hal-hal positif dari demokrasi 4. Bagaimana sebuah negara disebut negara demokratis. Sebutkan contohnya. 5. Bagaimana sebuah negara disebut negara tidak demokratis. Sebutkan contohnya. <p>Fasilitator kemudian merangkum jawaban peserta dan memasukkan dalam pengelompokan sesuai kategori berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi Demokrasi 2. Tantangan Demokrasi 3. Sisi Positif Demokrasi 4. Sisi Negatif Demokrasi 5. Fakta-Fakta Negara disebut Demokratis 6. Fakta-Fakta Negara Tidak Demokratis | <p>60 Menit</p> |
|-------------------------|---|-----------------|

| | | |
|-----------|--|----------|
| Paparan 3 | <p>Fasilitator memberikan kutipan-kutipan mengenai demokrasi yang ditayangkan dalam slide presentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aristotle <i>“Demokrasi adalah ketika rakyat jelata, dan bukan orang kaya, adalah pemimpin.”</i> 2. Thomas Hobbes <i>“Pemerintahan itu diperlukan, bukan karena manusia secara alamiah jahat ... tetapi karena manusia secara alamiah bersifat lebih individualistis daripada sosial.”</i> 3. Abraham Lincoln <i>“Sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat..”</i> 4. Mahatma Gandhi <i>“Ide saya mengenai demokrasi adalah bahwa di dalamnya, yang paling lemah harus punya kesempatan yang sama dengan yang paling kuat..”</i> 5. Thomas Jefferson <i>“Tujuan dari pemerintahan adalah memampukan rakyat dari sebuah negara untuk hidup dalam keamanan dan kebahagiaan. Pemerintahan hadir untuk kepentingan mereka yang diperintah, bukan pemerintah itu sendiri.” “Ketika rakyat takut akan pemerintah, berarti ada tirani; ketika pemerintah takut akan rakyatnya, ada kebebasan.”</i> 6. Nelson Mandela <i>“Demokrasi didasarkan pada prinsip mayoritas. Hal ini makin ternyata di negara seperti Afrika Selatan di mana hak mayoritas telah secara sistematis direnggut. Pada saat yang bersamaan, demokrasi juga memerlukan perlindungan bagi hak politik dan minoritas lain.”</i> | 20 Menit |
|-----------|--|----------|

| | | |
|-----------|---|----------|
| | <p>7. Barack Obama <i>“Demokrasi tidak bisa dipaksakan pada negara manapun dari luar. Setiap masyarakat harus mencari jalannya sendiri, dan tidak ada jalan yang sempurna.”</i></p> <p>8. Confucius <i>“Pemerintahan opresif harus ditakuti lebih daripada harimau.”</i></p> | |
| Paparan 4 | <p>Fasilitator Menjelaskan Elemen Kunci Demokrasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan Atas Hak Asasi Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Hak Memilih b. Kebebasan Bicara dan Berkelompok c. Kebebasan Beragama d. Hak Mendapatkan Kesetaraan 2. Pemilihan Demokratis <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh penduduk yang memiliki hak pilih dapat memilih b. Pemilihan dilakukan secara rutin c. Pemilihan yang Bebas dan Adil d. Kekuasaan di tangan Mayoritas 3. Pemerintahan Demokratis <ol style="list-style-type: none"> a. Transparansi b. Tanggap c. Efektif dan Efisien d. Akuntabilitas 4. Penghormatan Hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap keputusan berdasarkan hukum yang berlaku b. Tidak ada yang bebas dari atau diatas hukum c. Aturan Hukum membantu rakyat merasakan keuntungan demokrasi d. Pengadilan yang independen | 60 Menit |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | Dalam menjelaskan elemen-elemen penting tersebut Fasilitator dapat menggambarkan dengan ilustrasi Pohon Demokrasi yang dibagi dalam dua jenis yaitu jenis Daun yang menunjukkan proses dan jenis buah yang menunjukkan hasil dari proses demokrasi. | |
| Diskusi Kelompok | <p>Fasilitator Memutarkan Video</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=npNF9ByzlsE</p> <p>Fasilitator menjelaskan dampak korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan: Kerusakan lingkungan adalah salah satu konsekuensi dari sistem yang korup. Kurangnya atau tidak adanya penegakan regulasi dan legislasi lingkungan dapat menyebabkan sumber daya alam yang berharga akan dieksploitasi tanpa henti, dan seluruh sistem ekologi dihancurkan. Mulai dari penambangan hingga penebangan, hingga dampak karbon, perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia membayar uang sogok demi penghancuran yang tidak dibatasi. | 40 Menit |

| | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Ekonomi: Korupsi menggerogoti kekayaan nasional. Para politisi korup akan menggunakan dana publik untuk investasi yang lebih menguntungkan mereka daripada komunitas, dan memprioritaskan proyek bernilai besar misalnya bendungan, pembangkit listrik, saluran pipa, dan penyulingan daripada infrastruktur yang mendesak misalnya sekolah, rumah sakit dan jalan. Korupsi juga menghalangi pembangunan struktur pasar yang adil dan mendistorsi kompetisi, yang pada akhirnya mengurangi jumlah investasi masuk. 3. Sosial: Korupsi melemahkan konstruksi sosial dalam masyarakat. Ini meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada kepada sistem politik, baik secara institusi maupun kepemimpinannya itu sendiri. Ketidakpercayaan atau ketidakpedulian publik akan menjadi masalah tambahan dalam menghadapi korupsi. 4. Politik: Korupsi adalah penghalang besar bagi demokrasi dan aturan hukum. Dalam institusi demokratis, Lembaga kehilangan legitimasi ketika mereka menyalahgunakan kuasa demi keuntungan pribadi. Ini membahayakan demokrasi yang telah terbangun, tetapi lebih berbahaya lagi pada sistem demokrasi yang baru saja terbentuk. Sangat sulit membentuk kepemimpinan politik yang bisa dipercaya dalam iklim yang korup. | |
|--|---|--|

| | | |
|-----------|---|----------|
| Paparan 2 | <p>Fasilitator menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan Global, dengan menjelaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Indonesia dalam komunitas internasional 2. Nilai-nilai Asia dan Demokrasi 3. Demokrasi dan anti Korupsi 4. Lembaga-Lembaga yang konsern di pemerintahan yang bersih | 20 Menit |
| Penutup | Fasilitator menyimpulkan hasil belajar dan melakukan penutupan dengan game | |

BAGIAN IV

Mempromosikan Demokrasi

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta memahami dasar-dasar promosi demokrasi
2. Peserta memahami bagaimana caranya mengkampanyekan demokrasi.
3. Peserta dapat memilih isu sosial untuk meningkatkan upaya demokratisasi dalam lingkungan.

Capaian Pembelajaran

1. Pengetahuan dan keterampilan mempromosikan demokrasi dan Pemilu
2. Keahlian dalam mengkampanyekan kebijakan-kebijakan demokratis.
3. Kemampuan mengorganisasikan kampanye demokrasi.

Pertanyaan Kunci

1. Apa yang dimaksud dengan mempromosikan demokrasi?
2. Apa saja prinsip dasar dalam sosialisasi demokrasi?
3. Pada kondisi apa promosi demokrasi bisa terjadi?

Waktu

435 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan/Tema | Durasi |
|---------------|---|----------|
| Pengantar | <p>Fasilitator memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama. Dalam perkenalan ini Fasilitator dapat menggunakan permainan.</p> <p>Mengawali materi yang akan disampaikan, Fasilitator bertanya kepada masing-masing peserta terkait pertanyaan promosi dan advokasi dalam demokrasi. Kemudian masing-masing mendiskusikan dan menuliskan dalam kertas dari pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator; yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Anda pahami mengenai promosi demokrasi?2. Apa pengalaman pribadi Anda dalam mempromosikan demokrasi?3. Apakah Anda Pernah melakukan advokasi?4. Ceritakan pengalaman Advokasi Anda. | 35 Menit |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| Presentasi 1 | <p>Menyimpulkan dengan standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi demokrasi adalah Langkah untuk mencapai perdamaian dan keamanan nasional dan internasional, kemajuan ekonomi dan sosial, pembangunan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. 2. Promosi demokrasi adalah upaya bersama untuk mendukung hak-hak dasar manusia dan terwujudnya konsolidasi demokrasi. <p>Fasilitator menjelaskan beberapa hal untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ciri utama promosi demokrasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilu Bebas dan Adil serta Partai Politik yang Kokoh. b. Institusi Demokrasi yang kokoh yaitu konstitusi demokratis, institusi peradilan yang efektif, perwakilan pemerintahan yang responsif, militer yang pro demokrasi. c. Masyarakat Sipil Aktif yaitu advokasi yang kuat, warga negara yang terdidik, media massa yang independen dan serikat yang kokoh. | 100 Menit |
|--------------|---|-----------|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>4. Prinsip Mengkampanyekan demokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan warga dalam menentukan keputusan b. Sistem perwakilan c. Aturan hukum d. Sistem pemilihan kekuasaan mayoritas e. Kesetaraan bagi seluruh warga pada tingkatan tertentu f. Kebebasan pada tingkat tertentu yang diberikan atau didapatkan oleh warga g. Pendidikan <p>5. Advokasi adalah upaya memunculkan perubahan dan pembangunan pada area kebijakan baru, agar dapat menangani masalah kebutuhan di komunitas manapun.</p> | |
| | <p>6. Fasilitator Menjelaskan metode advokasi dengan SMART;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. S-Specific: Memiliki tujuan khusus bagian setiap tindakan yang akan dilakukan. b. M-Measurable: Tujuan harus dapat diukur. c. Achievable: Tujuan harus dapat dicapai atau bisa dipraktikkan d. R-Realistic: Tujuan harus nyata bisa dipercaya. e. T-Time-bound: Tujuan harus bisa dicapai dan diperoleh dalam rentang waktu tertentu. | |

Fasilitator menampilkan Kutipan tentang Promo-
si Demokrasi:

1. **John Adams** “Pemerintahan diciptakan atas harapan untuk kebaikan semua orang, dan untuk perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat; bukan untuk keuntungan, martabat, atau kepentingan pribadi dari individu, keluarga, atau kelas manapun: karena itu, rakyat memiliki hak yang tak bisa dipertentangkan, dihilangkan, dan dilenyapkan untuk membangun pemerintah; dan mereformasi, mengubah, atau membuat pergeseran masif, ketika perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan mereka membutuhkan itu.”
2. **Natan Sharansky** “Dua hal paling penting yang bisa dilakukan untuk mempromosikan demokrasi di dunia adalah pertama, mengembalikan nurani moral ke dalam urusan dunia dan kedua, menghubungkan kebijakan internasional kepada pengembangan demokrasi di seluruh dunia..”
3. **Nelson Mandela** “Masyarakat yang terdidik, tercerahkan, dan berpengetahuan adalah salah satu cara terbaik dalam mempromosikan demokrasi sehat.”
4. **Thomas Jefferson** “Demokrasi akan lenyap ketika Anda merampas hak mereka yang mau bekerja dan memberikannya pada mereka yang menolak bekerja.”

| | | |
|--|--|--|
| | <p>5. Barack Obama “Kita harus mengurangi dampak merusak dari kuasa uang terhadap demokrasi. Kita harus bersikeras mendorong adanya transparansi tetapi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya; perlu ada partisipasi.”</p> <p>6. Benazir Bhutto “Demokrasi butuh dukungan, dan dukungan terbaik bagi demokrasi datang dari demokrasi yang lain.”</p> <p>7. Naomi Wolf “Selalu ada risiko dalam advokasi demokrasi bahwa orang pertama yang bangun dari tidurnya mungkin tidak mendukung apa yang Anda dukung, tetapi itu adalah risiko yang layak diambil. Saya lebih memilih punya masyarakat yang tidak saya setuju tetapi terorganisir dan aktif daripada sekumpulan kecil oligarki yang saya setuju.”</p> <p>8. Elijah Cummings “Ketika kita berurusan dengan para malaikat, pertanyaan akan diberikan: pada tahun 2019, apa yang kita lakukan untuk memastikan demokrasi tetap terjaga? Apakah kita hanya akan menjauh dan tidak berkata apa-apa?”</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Penugasan | <p>Fasilitator membagi kelompok menjadi 8 kelompok dan memberikan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelompok memilih dari tema berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ayo Awasi Pemilu b. Tolak Politik Uang c. Tolak Politisasi SARA d. Menjadi Pengawas Partisipatif 2. Masing-masing kelompok membuat materi dalam bentuk video maksimal 5 menit. 3. Pembuatan materi video dilakukan secara berkelompok dan menyesuaikan dari tema yang dipilih. 4. Sebelum dibuat menjadi konten video, materi kelompok didiskusikan dengan fasilitator. 5. Seluruh materi video ditayangkan untuk didiskusikan dengan kelompok lainnya. 6. Fasilitator memberikan kesempatan antar kelompok untuk memberikan respon terhadap video hasil setiap kelompok. 7. Fasilitator menyimpulkan sesi promosi demokrasi. | 180 Menit |
| Penutup | Fasilitator menyimpulkan hasil belajar dan melakukan penutupan dengan game | |

BAGIAN V

Memperjuangkan Demokrasi

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta memahami ide memperjuangkan demokrasi
2. Peserta memahami bagaimana caranya memperjuangkan demokrasi.
3. Peserta dapat menyusun konsep dan metode memperjuangkan demokrasi

Capaian Pembelajaran

1. Pengetahuan dan ketrampilan tata cara memperjuangkan demokrasi
2. Keahlian dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan demokratis.
3. Kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi.

Pertanyaan Kunci

1. Apa yang dimaksud dengan istilah memperjuangkan demokrasi?
2. Bagaimana demokrasi bisa dibela baik secara personal, kelompok maupun kelembagaan?
3. Apa saja prinsip dasar dalam memperjuangkan demokrasi?
4. Mengapa ada keharusan memperjuangkan demokrasi?

Waktu

435 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan/Tema | Durasi |
|---------------|--|----------|
| Pengantar | <p>Fasilitator memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama. Dalam perkenalan ini Fasilitator dapat menggunakan permainan.</p> <p>Mengawali materi yang akan disampaikan, Fasilitator bertanya kepada masing-masing peserta terkait pertanyaan memperjuangkan demokrasi demokrasi. Kemudian masing-masing mendiskusikan dan menuliskan dalam kertas dari pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator; yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda pahami mengenai memperjuangkan demokrasi? 2. Bagaimana demokrasi bisa diperjuangkan? 3. Sebutkan beberapa cara untuk memperjuangkan demokrasi. <p>Fasilitator merangkum semua jawaban dari peserta kemudian memberikan kesimpulan dari seluruh jawaban tersebut.</p> | 20 Menit |
| Presentasi 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Kunci Memperjuangkan Demokrasi. Prinsip perjuangan demokrasi adalah kuasa berasal dari rakyat, warga adalah pemilih dan memberikan mandate untuk menggunakan kekuasaan. Kekuasaan dilaksanakan melalui perwakilan terpilih secara langsung untuk melayani kepentingan rakyat dan kebaikan bersama. 2. Memperjuangkan demokrasi melalui ruang digital. 3. Memperjuangkan demokrasi melalui media sosial 4. Memberdayakan perempuan, disabilitas, warga terpinggirkan dan kelompok rentan lainnya. | 60 Menit |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| Penu- gasan | <p>Fasilitator membagi kelompok menjadi 8 kelompok dan memberikan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelompok memilih dari tema berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperjuangkan Kelompok Perempuan dalam Pemilu b. Memperjuangkan Masyarakat Adat Dalam Pemilu c. Memperjuangkan Kelompok Disabilitas dalam Pemilu d. Memperjuangkan Pemilih Pemula dalam Pemilu. 2. Masing-masing kelompok mendiskusikan secara intensif tema yang diambil dengan cara; <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil satu peristiwa tentang persoalan yang dihadapi sesuai tema dari pengalaman pemilu/pilkada dalam 10 tahun terakhir. b. Menggambarkan peristiwa tersebut. c. Melakukan penilaian dan analisis terhadap tema yang diambil. 3. Pembuatan materi video dilakukan secara berkelompok dan menyesuaikan dari tema yang dipilih. 4. Sebelum dibuat menjadi konten video, materi kelompok didiskusikan dengan fasilitator. 5. Seluruh materi video ditayangkan untuk didiskusikan dengan kelompok lainnya. 6. Fasilitator memberikan kesempatan antar kelompok untuk memberikan respon terhadap video hasil setiap kelompok. <p>Fasilitator menyimpulkan diskusi kelompok.</p> | 100 Menit |
|----------------|---|--------------|

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| <p>Presentasi 2</p> | <p>Fasilitator menyampaikan kutipan tentang Memperjuangkan Demokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plato <i>“Salah satu hukuman menolak partisipasi dalam politik adalah Anda harus menerima diperintah oleh orang yang lebih rendah darimu.”</i> 2. Thomas Jefferson <i>“Pembelaan terbaik atas demokrasi adalah pemilih yang terpelajar.”</i> 3. Mahatma Gandhi <i>“Saya memahami demokrasi sebagai sesuatu yang memberikan mereka yang lemah peluang yang sama dengan mereka yang kuat..”</i> 4. Joseph Estrada <i>“Melalui kotak suara, kita bisa melindungi demokrasi kita dari ancaman pemerintahan diktator.”</i> 5. Kofi Annan <i>“Saya sudah menjadi pembela demokrasi yang tak kenal lelah sepanjang hidup saya karena saya yakin ini adalah sistem politik yang paling kondusif bagi kedamaian, pembangunan inklusif, aturan hukum, dan respek terhadap hak asasi manusia— Pilar bagi masyarakat yang baik.”</i> 6. Franklin D Roosevelt <i>“Demokrasi tidak dapat berhasil kecuali mereka yang mengekspresikan pilihan mereka siap untuk memilih dengan bijak. Pelindung demokrasi sebenarnya, oleh karena itu, adalah pendidikan.”</i> 7. BR Ambedkar <i>“Demokrasi politik tidak dapat bertahan kecuali didalamnya terdapat fondasi yakni demokrasi sosial. Apa artinya demokrasi sosial? Artinya adalah cara hidup yang mengakui kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan sebagai prinsip hidup..”</i> | <p>20 Menit</p> |
|---------------------|--|-----------------|

| | | |
|--------------|---|----------|
| | <p>8. Thurgood Marshall <i>"Di mana Anda melihat sesuatu yang salah atau ketimpangan atau ketidakadilan, lawanlah, karena ini adalah negaramu. Ini adalah demokrasi. Bangunlah. Lindungi. Wariskanlah."</i></p> <p>9. APJ Abdul Kalam <i>"Dalam sebuah demokrasi, kesajahteraan, individualitas, dan kebahagiaan setiap warga penting bagi kemakmuran, kedamaian, dan kebahagiaan bangsa secara umum.."</i></p> <p>10. Pete Gallego <i>"Demokrasi yang tangguh memerlukan partisipasi aktif."</i></p> <p>11. George Soros <i>"Sebuah diskusi yang menyeluruh dan adil adalah bagian esensial dari demokrasi."</i></p> | |
| Presentasi 3 | <p>Fasilitator menjelaskan Media dan Politik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas: Media seringkali mengungkapkan penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah, perbuatan tidak etis oleh pejabat, atau permasalahan dalam masyarakat. 2. Penjaga: Media membantu menciptakan agenda publik, atau isu yang diperhatikan orang. Hal ini membuat publik memberikan perhatian pada isu yang tidak menjadi perhatian. 3. Pengamat: Mengamati siapa saja yang terdepan dalam polling. Ke mana tokoh politik menyampaikan agendanya, siapa memenangkan pemilu, penyampaian data dan informasi penyelenggara Pemilu dll | 60 Menit |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | <p>Peran Teoritis Media dalam Demokrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Demokrasi: Ikut andil membentuk opini bebas 2. Fungsi normative: mendidik warga negara dan mengawasi pemerintahan 3. Fungsi deskriptif: memberi opini berbeda, menyediakan informasi mengenai isu-isu yang ada, membongkar tindak melawan hukum. 4. Tuntutan normatif: keadilan, informasi dan pengawasan 5. Tuntutan deskriptif: Tidak berpihak, nilai informasi (relevansi, kepadatan, cakupan, kedalaman), kualitas pengawasan (ketepatan, efektifitas, kebenaran, independensi, keadilan) | |
| Diskusi Film | <p>Fasilitator membagi kelompok menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok menonton dan mendiskusikan satu film berikut ini:</p> | 180 Menit |
| | <p>1. The Shock Doctrine (2009)</p> <p>https://www.documentarymania.com/player.php?title=The%20Shock%20Doctrine</p> <p>(Berdasarkan buku Naomi Klein yang juga berjudul <i>The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism</i>, buku ini menyampaikan kritik terhadap kebijakan pasar bebas neoliberal yang telah menguasai dunia. Dengan menggunakan shock therapy sebagai metafora, buku ini membahas bagaimana militerisasi, bencana (apakah natural atau buatan manusia) digunakan untuk memperkuat perubahan politik dan ekonomi yang tidak menguntungkan pemerintahan dan populasi yang tidak tunduk)</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>2. Shari’ah, Fiqh and State Laws (2018)</p> <p>https://youtu.be/xHrK2Z2K_Ik</p> <p>(Batasan antara beberapa istilah kunci seperti Syariah, fiqh, dan Hukum Islam seringkali dikaburkan dan membingungkan dalam bahasa sehari-hari. Kebingungan ini berdampak pada ketimpangan gender dalam hukum keluarga modern yang pada akhirnya membahayakan perempuan. Upaya untuk mengubah hukum negara ke arah keadilan dan kesetaraan bagi perempuan telah dihalangi oleh mereka yang mengganggu ini berseberangan dengan Syariah. Video ini menyoroti mengapa penting untuk membedakan istilah-istilah ini untuk dapat membedakan hak yang ilahi dan abadi dari yang manusiawi dan sementara)</p> | |
| | <p>3. #MoveTheMoney From War to Peace (2016)</p> <p>https://youtu.be/Tys3snVT9n0</p> <p>(Menghadirkan ketimpangan luar biasa antara uang yang digunakan dalam perang dan konflik dengan yang digunakan dalam promosi kesetaraan gender, kebijakan keadilan sosial, dan pergerakan perdamaian)</p> | |
| | <p>4. Fahrenheit 9/11</p> <p>https://www.flmsforaction.org/watch/fahrenheit-911/</p> <p>(Film kontroversial ini mengajak penonton menelusuri kompleksitas hubungan militer-industri pemerintahan Amerika Serikat setelah invasi AS ke Iraq)</p> | |

| | | |
|---------|---|--|
| | <p>5. Banaz: A Love Story (2012)</p> <p>https://youtu.be/VepuyvhHYdM</p> <p>(Dokumenter ini mencatat sejarah aksi yang sangat kejam—pembunuhan atas dasar kehormatan terhadap Banaz Mahmod, seorang perempuan muda Inggris di area pemukiman London tahun 2006, dibunuh dan “dihilangkan” keluarganya sendiri, dengan persetujuan dan bantuan sebagian besar komunitas Kurdish, karena ia mencoba untuk memilih kehidupannya sendiri)</p> <p>Setiap kelompok mendiskusikan dan menyimpulkan bagaimana interaksi aspek-aspek patriarki, militerisme dan globalisasi berlangsung. Hasil diskusi kelompok disampaikan dalam forum pleno.</p> | |
| Penutup | Fasilitator Menutup Sesi. | |

BAGIAN VI

Memperkuat Demokrasi Lokal

Tujuan Pembelajaran

1. Merefleksikan praktik demokrasi di daerah peserta masing-masing
2. Memahami jenis-jenis demokrasi pada tingkat yang lebih kecil
3. Memberikan cara pandang demokrasi dari sudut pandang peserta
4. Mempelajari demokrasi lokal sebagai sebuah konsep dan praktik.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu menggambarkan praktik yang berjalan di masing-masing asal daerahnya.
2. Peserta dapat memberikan penjelasan secara rinci problematika atau inisiatif yang berlangsung.
3. Peserta memberikan penilaian atas praktik demokrasi yang berlangsung.
4. Peserta menghasilkan dokumen dalam bentuk narasi dan video terkait penilalaian praktik demokrasi yang berlangsung di daerahnya masing-masing.

Pertanyaan Kunci

1. Problem atau inisiatif demokrasi apa yang terjadi di daerah Anda?
2. Jika itu problem, apa konsep anda untuk mewujudkan perubahan terhadap praktik non demokratis tersebut?
3. Jika itu inisiatif, gagasan apa untuk melakukan penyemaian terhadap inisiatif tersebut?
4. Buat gagasan anda dalam bentuk narasi dan video.

Waktu

840 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan/Tema | Durasi |
|---------------|---|----------|
| Pengantar | <p>Fasilitator membuka sesi dan memberikan pengantar sesi ini adalah sesi individual peserta.</p> <p>Fasilitator menjelaskan tentang penguatan demokrasi lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan demokrasi lokal adalah menanamkan demokratisasi dari jarak yang paling dekat dengan masyarakat dengan pengambilan keputusan yang melibatkan semakin banyak orang. 2. Keuntungan dari demokrasi lokal adalah; <ol style="list-style-type: none"> a. Mengurangi kemiskinan b. Meningkatkan standar kehidupan c. Menjunjung tinggi Kesehatan lingkungan d. Memperkuat demokrasi yang lebih tinggi e. Membangun Kembali komunitas f. Membangkitkan area pedesaan. | 60 Menit |
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Konsep Kunci Demokrasi Lokal <ol style="list-style-type: none"> a. Kewarganegaraan dan Komunitas: institusi dan prosedur pengambilan keputusan memungkinkan terbentuknya demokrasi yang lebih langsung dimana suara individu bisa dapat didengar dengan cara paling mudah. b. Musyawarah: musyawarah mencakup lebih dari mendengarkan keluhan. Musyawarah dialog memberi dan menerima diantara semua kelompok kepentingan dalam komunitas tentang keputusan dan tindakan utama yang dihadapi bersama. | |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| | <p>c. Pendidikan Politik: berpengetahuan dan berpendidikan membuat demokrasi (pengambilan keputusan bersama) menjadi mungkin lebih efektif.</p> <p>d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kesejahteraan Sosial: kebajikan dan kecerdasan rakyat akan mendorong pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial.</p> | |
| Penugasan | <p>Fasilitator memberikan tugas kepada Setiap Peserta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Peserta memilih tema dari dua kategori berikut ini; <ol style="list-style-type: none"> a. Persoalan demokrasi (baik prosedur maupun substansi/kebijakan) yang terjadi di wilayahnya masing-masing. b. Inisiatif pemerintah daerah dalam penguatan demokrasi lokal. 2. Setiap peserta memiliki kewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat Artikel terhadap tema yang dipilih maksimal 1000 kata. b. Membuat video sesuai tema maksimal 5 menit. 3. Dalam artikel dan video yang dibuat, wajib memuat. <ol style="list-style-type: none"> a. Problem atau inisiatif yang diambil. b. Analisis terhadap problem atau inisiatif tersebut. c. Gagasan mengatasi problem atau merawat inisiasi. | 120 Menit |
| Diskusi Bersama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk membacakan artikel dan/atau menampilkan video untuk didiskusikan bersama. 2. Fasilitator memberikan tugas kepada setiap peserta untuk menindaklanjuti materi yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di daerahnya masing-masing. | 180 Menit |

BAGIAN VII

Review Materi Pelatihan dan Evaluasi

Pokok Bahasan

Review Materi pelatihan

Sub Pokok Bahasan

- a. Prinsip dasar review
- b. Proses pelaksanaan review

Indikator Capaian

- a. Paham prinsip dan tujuan review pelatihan
- b. Peserta lebih paham materi-materi pelatihan

Metode

Ceramah, dialog, penugasan Ceramah, dialog, penugasan

Media / Bahan

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol

Waktu (Menit)

60 menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan & Tema | Penanggung Jawab | Durasi |
|---------------|---|-----------------------|----------|
| Review Materi | <ol style="list-style-type: none">1. Sebelum kegiatan dimulai, Panitia membagikan post-test terkait dengan materi yang disampaikan.2. Post test sebanyak 20 pertanyaan yang substansinya sama sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti SKPP Dasar3. Panitia dapat meminta pertanyaan post test kepada calon narasumber sehingga terdapat relevansi antara pertanyaan dengan materi yang disampaikan. | Panitia & Fasilitator | 30 Menit |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Panitia merangkum dan melakukan analisis terhadap hasil dari post test untuk dijadikan evaluasi terhadap materi pembelajaran 5. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan langsung terhadap materi apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dan mengemukakan alasannya. 6. Fasilitator mempresentasikan hasil post test secara umum dan memberikan rekomendasi kepada peserta untuk mendalami materi-materi yang belum didapatkan secara utuh sepanjang pelatihan berlangsung. | | |
|--|--|--|--|

Pokok Bahasan

Evaluasi

Sub Pokok Bahasan

- a. Konsep dasar evaluasi
- b. Mekanisme pelaksanaan evaluasi

Indikator Capaian

- Paham konsep dasar dan tujuan evaluasi pelatihan
- Diperoleh gambaran tingkat penyerapan materi oleh peserta

Metode

Brainstorming, penugasan

Media / Bahan

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, form evaluasi

Waktu (Menit)

60 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan & Tema | Penanggung Jawab | Durasi |
|-----------------|--|------------------|----------|
| Evaluasi Proses | 1. Fasilitator membagikan kertas kecil kepada peserta untuk dituliskan jawaban dengan pertanyaan; Apa kekurangan dari pelatihan ini? Jawaban bersifat tertutup tanpa ditulis nama di kertas untuk menjaga kerahasiaan penulis. | Fasilitator | 30 Menit |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | <p>2. Fasilitator mengumpulkan jawaban dan membagi jawaban-jawaban kedalam tiga kelompok yaitu kelompok materi, fasilitator/panitia dan proses/sarana prasarana.</p> <p>3. Dari pembagian tersebut, Fasilitator memberikan refleksi dan pembelajaran terhadap aspek kekurangan pelatihan dari sudut peserta. Sekaligus memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pelatihan.</p> | | |
| Refleksi | Refleksi terhadap keseluruhan pelatihan | | |

BAGIAN VIII

Rencana Tindak Lanjut

Pokok Bahasan

Rencana Tindak Lanjut

Sub Pokok Bahasan

- a. Agenda Pasca pelatihan
- b. Perencanaan agenda pasca pelatihan

Indikator Capaian

- a. Paham tujuan agenda pasca pelatihan
- b. Mampu merancang agenda pasca pelatihan

Metode

Brainstorming, penugasan

Media / Bahan

LCD, alat tulis, flipchart, kertas plano, spidol, Form rencana tindak lanjut

Waktu (Menit)

240 Menit

| Pokok Bahasan | Alur Kegiatan & Tema | Penanggung Jawab | Durasi |
|------------------------------|--|-------------------------|----------|
| Rencana Tindak Lanjut | <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator membagi peserta kedalam beberapa kelompok menyesuaikan latar belakang peserta misalnya berdasarkan wilayah administrasi, berdasarkan keragaman latar belakang dan seterusnya.2. Masing-masing kelompok mendiskusikan, apa yang akan dikerjakan bersama setelah mengikuti SKPP Lanjut? Hasil diskusi dipresentasikan oleh masing-masing kelompok berikut dengan rencana pelaksanaannya. | Fasilitator dan Panitia | 90 Menit |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitator mencatat dan menyajikan hasil diskusi sebagai rencana tindak lanjut yang dilakukan masing-masing kelompok. 4. Ketua kelas bertanggung jawab untuk membuat jaringan komunikasi misalnya membuat Whatsapp grup agar terjalin komunikasi intensif dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut. 5. Bawaslu menyampaikan akan melakukan asistensi dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut oleh masing-masing kelompok dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi. 6. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan refleksinya dalam mengikuti SKPP Lanjut, dan dapat ditimpali oleh peserta yang lain. 7. Di akhir, para peserta memilih lagu untuk dinyanyikan bersama sebagai tanda berakhirnya pelatihan dan sebelum dilakukan penutupan secara resmi oleh Panitia. | | |
|--|--|--|--|

BAHAN BACAAN

**SEKOLAH KADER
PENGAWAS PEMILU
PARTISIPATIF**

TINGKAT LANJUT

Mendefinisikan Demokrasi

Apa arti demokrasi?

Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan di mana rakyat memilih pemimpin mereka, dan idealnya, rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Kuasa oleh rakyat juga seringkali disebut sebagai “kedaulatan populer” dan dapat mengacu pada bentuk pemerintahan oleh rakyat secara langsung, partisipatoris, dan representatif.

Istilah “demokrasi” mulanya berasal dari dua kata Yunani: “demos” (rakyat) dan “kratia” (kuasa atau otoritas). Demokrasi, secara harfiah berarti “kuasa oleh rakyat,” yang mana merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana warga negara menjalankan kuasa mereka lewat hak pilih.

Jadi, intinya, demokrasi adalah otoritas pemerintahan sah yang dibentuk dari lembaga yang berisi warga negara, terlepas dari gender, ras, agama, bangsa, etnis, identitas sosial, politik, atau opini apa pun. Bentuk-bentuk demokrasi tertua di dunia memiliki banyak kesamaan historis, tetapi manifestasi institusional dari prinsip demokrasi mereka bisa saja sangat berbeda satu dengan yang lainnya; karena itu, jumlah negara yang benar-benar bebas menunjukkan bahwa masing-masing sistem demokratis itu unik.

Menurut Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Komisi Tinggi HAM PBB, meskipun semua peradaban memiliki bentuk-bentuk berbeda dari demokrasi, konsep ini masih bisa diperdebatkan dan masih ada pertentangan perspektif dalam memahami makna demokrasi itu sendiri.

Tidak adanya kesamaan pandangan soal konsep demokrasi itu sebenarnya bukanlah masalah pelik, karena kontur permasalahan ini masih dapat diidentifikasi.

Ide-ide tersebut ditangkap oleh Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) pada sebuah resolusi bersejarah (2002/46) bertajuk 'Langkah lanjut untuk mempromosikan dan mengkonsolidasi demokrasi' dan kemudian dikembangkan melalui resolusi Human Rights Council 19/36 tahun 2012 bertajuk 'Hak asasi manusia, demokrasi, dan aturan hukum' yang menyatakan bahwa:

[D]emokrasi meliputi upaya menghargai segala hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk di dalamnya, kebebasan asosiasi dan pertemuan damai, kebebasan berekspresi dan beropini, kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama atau memegang kepercayaan, hak untuk diakui di mana pun sebagai manusia di hadapan hukum dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, memiliki hak pilih dalam sistem partai politik dan organisasi yang plural dan berhak untuk dipilih dalam sebuah pemilihan yang jujur, rutin, bebas, dan adil dengan hak pilih yang setara dan kerahasiaan yang menjamin ekspresi bebas kehendak manusia, sebagaimana juga adanya rasa hormat terhadap aturan hukum, pemisahan kuasa, kemerdekaan sistem pengadilan, transparansi, dan akuntabilitas di administrasi publik dan penentuan keputusan dan media yang bebas, merdeka, dan plural.

Definisi ini menggambarkan fakta bahwa demokrasi tidak terikat pada organisasi pemilihan demokratis, meskipun konsep ini sangat terikat pada ide ini.

Dengan kata lain, warga negara harus diberdayakan agar dapat berpartisipasi dalam proses politik secara terus-menerus, bahkan melampaui lingkup pemilihan resmi. Lebih lagi, demokrasi bukanlah sekedar bentuk konkrit dari kedaulatan populer (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) tetapi juga meliputi nilai-nilai tanggung jawab dan akuntabilitas³.

Meskipun demokrasi merupakan konsep universal dengan berbagai penerapan konkret, kelebihanannya dibandingkan bentuk pemerintahan lain telah diterima secara global dalam beberapa dasawarsa belakangan dan sekarang demokrasi diperdebatkan sebagai bagian esensial dalam pemenuhan aspirasi individu atau kolektif, sebuah penyampaian asa, dan pemeliharaan masyarakat sipil⁴.

Konsep demokrasi telah diterima dalam berbagai konvensi internasional yang diakui secara universal di bawah PBB. Pada tahun 1948, setelah penderitaan dan pelajaran yang didapat dari Perang Dunia 2, United Nations General Assembly (UNGA) dengan suara bulat menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Meskipun UDHR tidak secara legal mengikat sebagai deklarasi selayaknya instrumen hak asasi manusia lainnya, UDHR telah disetujui oleh seluruh negara anggota PBB, dan sebagai dokumen yang sah secara universal, mengangkat hubungan antara kedaulatan dan rakyat dari sebuah negara, Artikel 21 dari UDHR menyatakan bahwa:

Semua orang memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan negara mereka, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas [...] Kehendak rakyat akan menjadi dasar bagi otoritas pemerintah; ini akan diekspresikan dalam pemilihan yang periodik dan jujur yang mana didasarkan pada hak pilih yang universal dan setara.

Bersamaan dengan UDHR, Vienna Declaration on Human Rights tahun 1993 menyatakan bahwa demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural dan partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka.

Saat ini, kata demokrasi memiliki makna positif di hampir seluruh penjuru dunia, begitu kuatnya makna itu hingga agar dapat memberi kesan positif bagi dirinya, bahkan sistem politik yang tidak berdasarkan kuasa rakyat berani memanggil dirinya sendiri demokratis.

Matriks Demokrasi

Matriks demokrasi mendefinisikan demokrasi sebagai “sebuah bentuk dari aturan hukum,” yang memungkinkan adanya penentuan nasib sendiri bagi seluruh warga negara, dalam artian yang sama dengan kedaulatan populer, dengan mengunci partisipasi mereka dalam mengisi jabatan-jabatan terkait penentuan kebijakan (dan/atau dalam keputusan itu sendiri) lewat proses yang bebas, kompetitif, dan adil (seperti pemilu) dan mengamankan peluang untuk secara terus-menerus memengaruhi proses politik, dan secara umum, dengan menjamin bahwa segala gerak-gerik dalam

berpolitik akan diawasi. Partisipasi demokratis dalam pemerintahan karenanya diekspresikan dalam dimensi kebebasan berpolitik, kesetaraan politik dan kontrol legal politik.

Tiga Dimensi Matriks Demokrasi

- Kebebasan politik dalam pengaturan pemerintahan sendiri bagi warga negara.

Dimensi kebebasan di sini bersandar pada prinsip kebebasan pengaturan diri warga negara dalam komunitas politis. Pengaturan diri (pemerintahan sendiri) meliputi pemindahan preferensi individu melalui pemilihan sosok pengambil keputusan politik dalam pemilu yang bebas dan adil dan, lebih lanjut lagi, kemungkinan

adanya partisipasi politik yang terus-menerus, yang terstruktur dalam kerangka ruang publik lewat lembaga-lembaga perantara yang bersaing. Partisipasi politik dari warga negara dijamin oleh keberadaan hak sipil dan politik. Ditambah lagi, kedaulatan populer mengimplikasikan bahwa perwakilan terpilih juga merupakan pemegang kuasa politik dan menggunakan kuasa itu dengan cara sedemikian rupa untuk dapat menghargai hak-hak manusia sebagai individu.

- Kesetaraan Politik sebagai Kesetaraan Perlakuan Legal dan Partisipasi Adil dalam Keputusan Politik.

Dimensi kesetaraan di sini dipahami sebagai kesetaraan politik, meliputi kesetaraan perlakuan terhadap rakyat yang

adil dan formal oleh negara (egalitarianisme legal) dan, di lain sisi, memfasilitasi peluang bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam institusi demokrasi formal yang relevan dengan cara yang adil dan efektif (egalitarianisme input). Sementara dimensi kebebasan menempatkan kemungkinan partisipasi bebas pada sistem politik dalam pemaknaan aktif, dimensi kesetaraan bergelut dengan akses setara menuju hak-hak tersebut. Apakah mungkin bagi seluruh warga negara menggunakan hak politik dan sipil mereka secara efektif dan adil? Penekanan di sini karenanya adalah tentang kesetaraan dalam arti perlakuan setara sebagai komponen pasif.

- Kontrol Politik dan Legal sebagai Pengawasan Politik dan Legal terhadap Pemerintah

Sementara dimensi kebebasan di sini memberi ekspresi pada pilihan warga negara sebagai individu dan minat kelompok, dalam dimensi kontrol politik dan legal, tindakan dari agen-agen ini diarahkan pada pengawasan terhadap aktivitas pemerintah. Pengawasan ini berlaku pada pemerintah maupun pejabat terpilih.

Akuntabilitas vertikal dan horizontal akan disisipkan dalam definisi dimensi kontrol. Kontrol berlangsung ketika ada partisipasi politik warga negara atau lembaga penengah dalam ranah politik atau ranah masyarakat sipil atau lewat media, yang membongkar pelanggaran aturan hukum di ranah publik, dan apabila perlu, mengambil langkah hukum. Ini memang pernah terjadi melalui lembaga pengawasan

resmi di bawah dalam jaringan institusi pemerintah dan pemerintah semi-swasta. Standar tunggal dari kontrol legal adalah bahwa tindakan pemerintah tidak menyalahi aturan hukum.

Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED) dan Demokrasi

Tujuan utama dari GCED adalah untuk menumbuhkan rasa hormat bagi semua manusia, membangun rasa menjadi bagian dari kemanusiaan, dan untuk membantu pelajar agar dapat menjadi warga negara global yang bertanggung jawab dan aktif. Karena itu, GCED bertujuan untuk memberdayakan pembelajar supaya dapat mengambil peran aktif dalam menghadapi dan memberi solusi bagi tantangan- tantangan global, dan dengan begitu memampukan manusia itu untuk menjadi kontributor proaktif bagi dunia yang lebih damai, toleran, inklusif, dan aman.

Karena itu, pendidikan kewarganegaraan global membantu manusia muda untuk membangun kompetensi inti yang memampukan mereka untuk secara aktif ikut serta dalam misi-misi penting dunia dan membuatnya menjadi tempat yang lebih adil dan lestari. Ini adalah bentuk dari pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek yang menanganisu global seperti sosial, politik, dan ekonomi, atau permasalahan lingkungan alam.

Catatan PBB dalam inisiatif awal edukasi global (Global Education First Initiative):

Tidak cukup jika pendidikan hanya menghasilkan insan yang dapat membaca, menulis, dan berhitung. [...] Pendidikan harus sepenuhnya mengambil peran sentral dalam membantu manusia membentuk masyarakat yang lebih damai, toleran, dan inklusif¹⁰.

Menurut PBB, GCED menyediakan pemahaman, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan pelajar dalam bekerjasama menghadapi tantangan kompleks abad ke-21, termasuk perubahan iklim, konflik, kemiskinan, kelaparan, masalah keadilan dan keberlanjutan. Capaian pendidikan yang sama ini juga dapat mempersiapkan pelajar agar bisa berhasil di tempat kerja abad-21.

GCED adalah sebuah upaya seumur hidup yang membawa perubahan, dan melibatkan pembelajaran kurikuler maupun pengalaman praktis untuk membentuk cara berpikir yang peduli terhadap kemanusiaan dan planet bumi, memperlengkapi insan dengan kompetensi global agar dapat mengambil tindakan bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang lebih adil, damai, aman, lestari, toleran, dan inklusif. Definisi ini telah diratifikasi oleh Dewan Pendidikan Kewarganegaraan Global.

UNESCO memuji GCED sebagai pendekatan baru pada pendidikan yang berfokus pada membangun pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap pembelajar dengan tujuan partisipasi aktif mereka dalam membangun masyarakat tempat tinggal mereka yang damai dan lestari. GCED bertujuan untuk menyuntikkan rasa hormat pada hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan gender,

dan kelestarian lingkungan; segala nilai fundamental yang dapat menjadi pertahanan terhadap ekstremisme berbahaya¹¹.

Sejalan dengan pemahaman GCED ini, dampak pada tingkat individu meliputi tiga lingkup pembelajaran: kognitif, sosial-emosional, dan perilaku. Dampak kognitif meliputi kemampuan berpikir kritis dan pemahaman mengenai ekstremisme berbahaya dan radikalisasi. Dampak sosial-emosional mengacu pada perkembangan rasa menjadi bagian dari kemanusiaan, dan berbagi nilai dan tanggung jawab, berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Dampak perilaku terkait pada mendorong peserta untuk bertindak secara efektif dan bertanggung jawab pada tingkat lokal, nasional, dan global untuk membangun dunia yang lebih damai dan lestari¹².

Siapa itu Warga Negara Global?

The Global Citizens' Initiative (TGCI) mendefinisikan seorang warga negara global sebagai "seseorang yang melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari komunitas dunia dan yang memberi kontribusi dalam mendefinisikan nilai dan praktik komunitas ini." Menurut Ron Israel dari TGCI:

Menjadi warga negara global bukan berarti Anda harus melepaskan kewarganegaraan lain yang telah Anda miliki, seperti kewarganegaraan tempat tinggal, keterikatan pada komunitas lokal, agama, atau kelompok etnis. Menjadi warga negara global hanya berarti bahwa Anda memiliki satu lagi lapisan identitas (dengan planet sebagai keutuhan) bagi diri Anda sendiri. Dan apabila Anda serius dengan identitas baru Anda itu, akan ada

sekumpulan hak dan tanggung jawab yang harus diemban.

Seorang warga negara global adalah insan yang menyadari tentang dunia dan memiliki pemahaman akan peran mereka di sana; karenanya, mereka dapat membangun identitas global bersama. Dengan kata lain, sebagai akibat dari hidup dalam dunia yang sangat berkelindan dan saling membutuhkan, sebagai warga negara global, kita mendapatkan lapisan baru tanggung jawab global. Konsekuensinya, manusia seperti ini harus menghormati dan menghargai diversitas, dan memiliki pengetahuan akan masalah ini dan bekerja melawan ketidakadilan sosial. Warga negara global juga harus berpartisipasi dalam komunitas di segala tingkatan mulai dari lokal hingga global dan mengambil tanggung jawab atas tindakan dan kepercayaan mereka. Idealnya, warga negara global bersifat kreatif, fleksibel, berdedikasi, dan proaktif. Kemudian, mereka harus secara aktif berpartisipasi dalam komunitas internasional dan berkomitmen membangun komunitas ini. Ini berarti mengembangkan lima kemampuan: (1) memecahkan masalah, (2) mengambil keputusan, (3) berpikir kritis, (4) komunikasi, dan (5) kolaborasi. Kelima kemampuan ini semakin diperlukan untuk bisa sukses di tempat kerja, dan juga dalam kehidupan secara umum, dan tidak dapat dibangun tanpa pembelajaran sendiri yang aktif.

Nilai-nilai Asia dan Demokrasi

“Nilai-nilai Asia” adalah sebuah ideologi politik pada era 1990an yang mendefinisikan elemen kemasyarakatan, kebudayaan, dan sejarah yang mirip pada bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Timur. Tujuannya adalah menggunakan kesamaan nasib (sebagai

contoh, prinsip kolektivisme) untuk menyatukan rakyat demi kebaikan ekonomik dan sosial mereka dan untuk menciptakan identitas pan-Asia.

Nilai-nilai Asia dimaktubkan dan dipromosikan dalam Deklarasi Bangkok 1993, yang menekankan ulang prinsip kedaulatan, pengaturan nasib sendiri, dan ketiadaan interferensi dalam hak sipil maupun politik.

Nilai-nilai ini meliputi:

- Prioritas untuk harmoni sosial;
- Kepedulian terhadap kemakmuran sosio-ekonomi dan kesejahteraan kolektif dalam komunitas;
- Kesetiaan dan respek terhadap pemegang kuasa;
- and Memilih kolektivisme dan komunitarianisme.

Kritik terhadap Nilai-nilai Asia

Konsep nilai-nilai Asia bersandar pada beberapa praduga, yang kesemuanya memiliki permasalahan metodologis. Faktanya, frase “Nilai-nilai Asia” mengimplikasikan bahwa karakteristik sosial, ekonomi, dan politik dari negara- negara Asia tertentu didasarkan pada sebuah sistem nilai bersama yang dapat diidentifikasi dan unik dan yang melampaui batas perbedaan kebangsaan, keagamaan, dan ideologi.

Nilai-nilai Asia dapat didiskusikan secara lepas dalam konteks ‘Dikotomi Timur- Barat’ sebagaimana ditulis oleh

Thorsten Pattberg. Hal ini meningkatkan tendensi untuk melebih-lebihkan dan menggeneralisasi, dan cenderung membuat kita menyimpulkan bahwa perdebatan ini berbau politis daripada substantif. Ketika para advokat Nilai-nilai Asia merayakan komunitas di atas individualisme, keluarga sebagai dasar masyarakat, kesederhanaan, respek terhadap keinginan belajar, kerja keras, tanggung jawab publik, dan kerjasama, mereka biasanya merendahkan argumen mereka sendiri dengan membuat perbandingan terhadap hilangnya nilai kekeluargaan, kemewahan, hedonisme, individualisme berlebih, kurangnya kerjasama, ketidakmampuan, dan rendahnya disiplin orang Barat. Sejatinya, ini adalah upaya membuat kontras antara dinamisme dan kesatuan Asia Timur dengan “kejatuhan moral” Barat dan hanya soal kejatuhan nilai masyarakat.

Kritik umum atas Nilai-nilai Asia dapat dilihat dari ‘kesuksesan’ banyak masyarakat demokratis Asia seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Sebagai dampaknya, beberapa kritik atas Nilai-nilai Asia telah diangkat ke permukaan.

Sebagai contoh, Amartya Sen (1999) mendebat kebenaran konsep Nilai-nilai Asia karena keberagaman budaya yang sangat tinggi di Asia, menjadikan argumen keseragaman ini tidak valid²⁰.

Anti-Korupsi dan Demokrasi

Korupsi mengikis demokrasi hingga menghasilkan siklus keji, di mana korupsi menggerogoti institusi demokratis dan, kemudian, institusi yang lemah tidak akan mampu mengendalikan korupsi.

- Patricia Moreira, Managing Director, Transparency International

Mendefinisikan Korupsi

Korupsi adalah salah satu ancaman global paling berbahaya di era ini. Korupsi merusak demokrasi, meningkatkan kesenjangan, dan berdampak buruk pada ekonomi dan lingkungan. Memerangi fenomena kompleks ini membutuhkan beberapa pendekatan secara bersamaan, termasuk program pendidikan yang diharapkan dapat memberdayakan generasi masa depan agar dapat menolak dan mencegah korupsi. Menurut Transparency International, korupsi dapat didefinisikan sebagai “penyalahgunaan kuasa yang telah diberikan untuk keuntungan pribadi.” Korupsi dapat digolongkan sebagai Besar, Kecil, atau Politis, tergantung jumlah uang yang lenyap dan sektor di mana korupsi terjadi.

Korupsi besar meliputi tindakan yang dilakukan pada tingkat pemerintahan dalam bentuk distorsi kebijakan atau fungsi sentral kenegaraan, memberi celah bagi para penguasa untuk mendapat keuntungan yang merugikan publik.

Korupsi kecil mengacu pada penyalahgunaan kuasa yang diberikan pejabat di tingkat rendah hingga menengah dalam lingkup kegiatan sehari-hari dalam interaksi dengan rakyat biasa, yang seringkali hanya ingin mendapatkan kebutuhan sehari-hari atau jasa di tempat seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian, dan agensi publik lain.

Korupsi politis adalah manipulasi kebijakan, institusi, dan prosedur dalam alokasi sumber daya dan keuangan oleh

pengambil keputusan politik, yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan kuasa, status, dan kekayaan lebih.

Apa itu Promosi Demokrasi?

Definisi promosi demokrasi telah menjadi bahan perdebatan selama lebih dari dua dasawarsa. Keragaman makna dari istilah yang digunakan adalah hasil dari pluralitas opini dan pendekatan oleh pelaku internasional, entah itu pemerintah, NGO, atau pihak ketiga lainnya. Sebagai contoh, istilah “promosi” itu sendiri bisa dimaknai sebagai terlalu mencampuri urusan orang lain atau mengimplikasikan gangguan. Serupa dengan itu, meskipun banyak orang menyukai kata “dukung” yang bisa jadi maknanya cukup lunak, beberapa orang lain bisa menganggapnya tidak cukup tegas. Belakangan ini perbedaan seperti kasus ini cenderung masuk ke dalam dua mazhab: mereka yang menganggapnya sebagai proses politis dan mereka yang menganggapnya sebagai proses developmental.

Secara utuh, promosi demokrasi, yang bisa juga dirujuk sebagai bantuan demokrasi, dukungan demokrasi, atau pembangunan demokrasi merupakan untaian kecil dari kebijakan asing yang diadopsi pemerintah dan organisasi internasional yang mencoba mendukung penyebaran demokrasi sebagai sistem politik di seluruh dunia. Dukungan terhadap demokrasi terletak pada kepercayaan bahwa negara dengan sistem pemerintahan demokratis memiliki kemungkinan lebih rendah melakukan perang, secara ekonomi lebih baik, dan secara sosial lebih harmonis.

Dalam Pengarahan Demokrasi tahun 2009, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengangkat poin-poin ini ke permukaan ketika ia mengatakan: “Demokrasi, berdasarkan aturan hukum, pada akhirnya merupakan sebuah langkah untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional, kemajuan ekonomi dan sosial dan pembangunan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Promosi demokrasi bersandar pada dua pola utama terkait jenis demokratisasi yang dihadapi sebuah negara: intervensi eksternal (termasuk sebagai solusi bagi perang sipil), atau mendukung dorongan internal bagi reformasi. Para advokat promosi demokrasi masih memperdebatkan soal pola yang mana lebih cenderung berhasil bagi program-program ini: mereka juga masih berselisih soal komponen dan faktor mana dalam proses itu paling penting bagi kesuksesan konsolidasi demokrasi.

Promosi demokrasi bisa didefinisikan dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum itu meliputi aktivitas kebijakan luar negeri yang dimaksudkan untuk mendorong transisi ke arah atau peningkatan demokrasi di negara lain. Sebagai contoh, bantuan luar negeri Amerika Serikat untuk mempromosikan demokrasi mungkin berfokus pada demokrasi elektoral, dengan penekanan khususnya pada pemilu bebas dan adil, atau merefleksikan konsep demokrasi yang lebih liberal yang termasuk mendukung hak mendasar dan standar yang dianggap membuat demokrasi bermakna. Setelah membedah makna promosi demokrasi yang dicapai dengan mengumpulkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku untuk menghormati aturan hukum, kebebasan berbicara, hak asasi

manusia, pengadilan independen, dan administrasi tidak bias, kita perlu menelaah bagaimana kampanye demokrasi yang berhasil dilaksanakan.

Mengapa harus mempromosikan demokrasi

(Catatan: pertanyaan ini mungkin mengarah ke diskusi pendek, melibatkan baik partisipan dan fasilitator)

Banyak pakar meyakini bahwa memperluas demokrasi dapat mengurangi terorisme dan pada saat bersamaan mendorong stabilitas politik global dan kemakmuran ekonomi. Dalam pidato Strategi Nasional Memberantas Terorisme 2006, mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush, menyebut promosi demokrasi sebagai solusi jangka panjang memenangkan apa yang ia sebut sebagai 'perang melawan teror.' Sebaliknya, pihak lain mengklaim bahwa dalam beberapa kasus, mempromosikan demokrasi dapat menggoyahkan sebuah negara, termasuk wilayah di dalamnya, dan telah mendokumentasikan perlawanan balik terhadap promosi demokrasi, termasuk pembatasan kebebasan di beberapa negara di mana proses tersebut telah terjadi. Keuntungan dan harga yang harus dibayar atas promosi demokrasi bisa berbeda-beda, tergantung kondisi di mana program itu dilaksanakan. Sebagai contoh, konsekuensinya bisa saja berbeda apabila demokrasi dipaksakan dengan mode militer dibandingkan jika negara itu mengambil inisiatif sendiri.

Apa Saja Cara-cara Utama Promosi Demokrasi?

Pemilu

Keberadaan proses pemilihan adalah prasyarat paling mendasar bagi sebuah pemerintah agar dianggap menjalankan demokrasi. Akan tetapi, sebagian besar pakar setuju bahwa menjalankan pemilu saja tidak cukup. Demokrasi lebih dari sekedar menjalankan pemilu; ini juga melibatkan adanya pemecahan kuasa di mana tidak ada satupun kelompok dalam masyarakat yang tidak memiliki akses partisipasi politik. Sebagai contoh, Freedom House menyatakan bahwa pemilu saja tidak cukup bagi sebuah negara untuk dianggap bebas; negara itu juga harus memiliki inisiatif sistem politik multi-partai yang kompetitif, hak pilih universal bagi semua orang dewasa, pemilu berkala dan rahasia, dan akses publik ke partai politik besar. Karena itu, menurut pakar demokrasi, Larry Diamond, demokrasi elektoral meliputi rakyat sipil, sistem konstitusional di mana pejabat legislatif dan eksekutif dipertandingkan dalam pemilihan multi-partai dengan hak pilih yang universal.

Dengan kata lain, meskipun proses elektoral adalah prasyarat minimum bagi sebuah negara agar dianggap demokratis, sebagian besar pakar setuju bahwa itu saja tidak cukup.

Promosi Institusi Demokrasi yang Kokoh

Cara lain untuk membangun demokrasi adalah mempromosikan institusi demokratis yang kokoh. Sebagaimana ditulis Dobbins dan lain-lain, "Amerika Serikat dan para sekutunya telah menggunakan 25x lebih banyak uang dan 50x lebih banyak

tentara, pada basis per kapita, dalam konflik Kosovo daripada konflik Afghanistan. Tingkat input yang lebih tinggi ini berdampak pada output yang lebih tinggi dalam pembangunan institusi demokratis dan pertumbuhan ekonomi.”

Satu faktor yang dianggap penting bagi transisi demokrasi yang mulus dan berhasil negara-negara Eropa tengah dan Timur adalah asosiasi yang mereka butuhkan untuk memastikan keamanan dan kemakmuran masa depan mereka, yakni keanggotaan NATO dan Uni Eropa, yang hanya bisa didapatkan dengan konsolidasi institusi dan proses demokratis.

Menciptakan Masyarakat Sipil Berwarna

Cara lain untuk mempromosikan demokrasi adalah membangun masyarakat sipil yang berwarna, yang dianggap banyak pihak sebagai prasyarat wajib adanya demokrasi fungsional.⁵⁸ Budaya politik demokratis membutuhkan sektor masyarakat sipil yang berwarna dan media independen yang memastikan warga sipil memperoleh informasi mengenai tindakan dan performa institusi dan pejabat pemerintahan, dan mereka juga memiliki akses untuk memengaruhi kebijakan publik secara bebas. Dalam beberapa tahun belakangan, lebih dari 90 pemerintahan telah berupaya mengesahkan hukum dan regulasi pembatasan, mengekang kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk ikut serta, bertindak bebas, atau menerima pendanaan asing. Pada 2017, hanya 13 persen dari penghuni dunia tinggal di negara dengan media yang benar-

benar bebas. Serupa dengan itu, pada 2016, 67 persen dari semua pengguna internet tinggal di negara di mana kritik terhadap pemerintahan, militer, atau keluarga penguasa harus disensor.

Mendefinisikan Kampanye bagi Demokrasi

Bagaimana Perserikatan Bangsa-bangsa Mempromosikan Demokrasi?

Aktivitas PBB dalam mendukung demokrasi dan pemerintah diimplementasikan melalui United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Democracy Fund (UNDEF), Department of Peace Operations (DPO), Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), dan United Nations Entity for Gender Equality dan the Empowerment of Women (UN Women), di antara banyak contoh. Aktivitas seperti itu tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan PBB dalam mempromosikan hak asasi manusia, pembangunan, dan perdamaian dan keamanan, dan juga termasuk:

- Membantu struktur parlemen dan pemerintahan lokal terdesentralisasi untuk meningkatkan mekanisme checks and balances agar demokrasi berhasil;
- Mempromosikan hak asasi manusia, aturan hukum, dan akses keadilan dengan membantu memperkuat ketidakterpencilan dan efektivitas institusi sistem hak asasi manusia nasional dan sistem peradilan;
- Memastikan kebebasan berekspresi dan akses pada informasi dengan memperkuat kapasitas legislasi dan media;

- Bantuan terhadap pemilu dan sokongan terhadap lembaga manajemen pemilu; dan
- Mempromosikan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik.

Electoral Assistance Division di bawah payung Department of Political Affairs (DPA), mendukung Focal Point PBB dalam memastikan keruntutan dan konsistensi ketentuan bantuan elektoral PBB. Ini termasuk melaksanakan analisis kebutuhan elektoral, menyarankan parameter bagi seluruh bantuan elektoral PBB, memberi konsultasi desain proyek, membuat kebijakan elektoral, mempertahankan memori institusional, dan menyediakan panduan teknis dan dukungan dalam implementasi proyek elektoral.

UNDP adalah penyedia utama bantuan teknis yang diberikan sebagai bagian dari mandat PBB untuk memimpin bantuan pemerintahan demokratis pada tingkat negara. Dalam menjaga perdamaian atau kondisi pasca-konflik, bantuan elektoral biasanya disediakan lewat anggota misi lapangan di bawah perlindungan Department of Peacekeeping Operations (DPKO) atau Militer dan anggota kepolisian misi penjaga perdamaian yang mendukung agensi penegakan hukum nasional dalam memastikan keamanan proses pemilihan. Aktor PBB lain yang terlibat dalam menyediakan bantuan elektoral termasuk OHCHR, Volunteers, UN Women, dan United Nations Office for Project Services, UNESCO, Peacebuilding Fund, dan UNDEF.

Prinsip Mengampanyekan Demokrasi

Analisis berikut ini menggunakan model sederhana elemen kunci demokrasi sebagaimana adanya saat ini:

| |
|--|
| 1. Keterlibatan warga dalam penentuan keputusan |
| 2. Sistem perwakilan |
| 3. Aturan hukum |
| 4. Sistem pemilihan kekuasaan mayoritas |
| 5. Kesetaraan bagi seluruh warga pada tingkatan tertentu |
| 6. Kebebasan pada tingkat tertentu yang diberikan atau didapatkan oleh warga |
| 7. Pendidikan |

Mendefinisikan Aktivisme Demokrasi

Aktivisme merupakan upaya-upaya mempromosikan, menghalangi, mengarahkan, atau mengintervensi dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, atau lingkungan dengan tujuan membuat perubahan dalam masyarakat. Bentuk aktivisme beragam mulai dari membangun mandat dalam komunitas (termasuk menulis surat untuk surat kabar), melayangkan petisi bagi pejabat terpilih, mencalonkan diri atau berkontribusi dalam kampanye politik, memberikan dukungan (atau boikot) pada perusahaan, dan bentuk demonstrasi aktivisme seperti unjuk rasa, pawai, demonstrasi, pendudukan, atau mogok makan.

Aktivisme menggunakan metode atau taktik berbeda dalam mencapai tujuan mereka. Keputusan mengenai taktik apa yang digunakan bisa saja direncanakan secara hati-hati atau tidak

sebelumnya, melalui kesepakatan dengan lembaga penegakan hukum soal kapan atau di mana mengadakan unjuk rasa, atau dilaksanakan secara spontan karena dorongan amarah. Taktik yang dipilih penting karena bisa menentukan bagaimana para aktivis dipandang dan karenanya, apa yang dapat mereka capai. Sebagai contoh, taktik tanpa kekerasan cenderung mampu memperoleh simpati publik lebih daripada yang menggunakan kekerasan dan dua kali lebih efektif mencapai tujuan yang mereka tetapkan.⁶³

Pelaku/Pemangku Kepentingan Terlibat dalam Aktivisme

Aktivisme demokrasi dapat dilaksanakan oleh aktivis akar rumput. Pada tingkat yang paling mendasar, aktivisme akar rumput dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki keinginan dan perasaan kuat mengenai sebuah isu hingga melaksanakan kampanye aktif untuk membawa perubahan. Aktivisme akar rumput bersandar pada hak kebebasan individu mendasar tentang kebebasan berbicara dan berekspresi. Sebagai tambahan, aktivis akar rumput tidak boleh dikendalikan oleh partai politik tertentu; idealnya, mereka harus merupakan kelompok independen yang punya renjana kuat mengenai isu-isu tertentu hingga mendorong mereka untuk bekerja demi perubahan.

Strategi Aktivisme Akar Rumput

Aktivisme akar rumput/pergerakan menggunakan model pengaturan diri otonom untuk mendorong anggota komunitas berkontribusi dengan mengemban tanggung jawab dan

tindakan bagi komunitas mereka. Pergerakan akar rumput memanfaatkan berbagai strategi mulai dari penggalangan dana dan mendaftarkan pemilih, hingga mendorong terjadinya pembicaraan politik. Tujuan dari pergerakan-pergerakan spesifik beragam dan terus berubah, tetapi pergerakan itu konsisten dalam fokus mereka meningkatkan partisipasi massa dalam politik.

Pergerakan akar rumput menggunakan taktik seperti ini untuk membangun kuasa dalam pergerakan lokal dan komunitas. Sebagai contoh, Grassroots Campaigns, organisasi non-profit yang didedikasikan untuk menciptakan dan mendukung pergerakan akar rumput di Amerika, mengatakan bahwa pergerakan akar rumput bertujuan untuk menggalang dana, membangun organisasi, membentuk kesadaran, dan memunculkan kesadaran akan nama tertentu, memenangkan kampanye, dan memperdalam partisipasi politik. Pergerakan akar rumput bekerja untuk mencapai hal ini dan tujuan lain menggunakan strategi yang diarahkan pada partisipasi lokal dalam politik lokal atau nasional. Selain itu, organisasi akar rumput memperoleh kuasa dari rakyat; karena itu strategi mereka adalah mendorong keikutsertaan masyarakat awam dalam perbincangan politik sejauh mungkin.

Di bawah ini adalah strategi yang terjadi pada tingkat akar rumput karena fokus mereka dalam melibatkan populasi lokal seperti mengadakan pertemuan di rumah; mengadakan pertemuan besar; berbicara dengan pejalan kaki atau mendatangi rumah ke rumah (seringkali disertai dengan brosur; menggerakkan kampanye menulis surat, menghubungi lewat telepon, dan surel; mengorganisir demonstrasi besar; menggalang dana dari berbagai penyumbang kecil untuk iklan politik atau kampanye, dll.

Apa itu advokasi?

Advokasi adalah upaya memengaruhi mereka yang memiliki kuasa membuat keputusan. Dalam kasus peserta (atau para pemimpin kelompok), advokasi

berarti membuat pidato atau pembelaan atas nama komunitas mereka. Advokasi bukanlah kegiatan konfrontatif. Ada banyak strategi yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini berarti sebelum tindakan dilaksanakan, strategi sudah terlebih dahulu dirancang untuk memperjelas siapa yang ingin dipengaruhi kelompok tersebut, dan mengapa, dan hasil yang ingin dicapai.

Capaian Advokasi

Tujuan dan capaian dari advokasi adalah memunculkan perubahan dan pembangunan pada area kebijakan baru, agar dapat menangani masalah kebutuhan di komunitas mana pun. Tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil yang diinginkan dari kegiatan advokasi.⁶⁴ Beranjak dari tujuan, capaian advokasi harus dapat diukur, realistis, dan punya alur waktu jelas. Saat mengatur capaian, kita harus mengingat bahwa capaian yang ada harus 'SMART'.

Memperjuangkan Demokrasi?

Hari-hari ini, semakin banyak pemerintahan di seluruh dunia menggunakan langkah pembatasan hukum untuk mengekang kelompok masyarakat sipil dan dengan begitu mencegah partisipasi warga dalam ruang pembangunan politik dan sosial.

Sebaliknya, upaya memperjuangkan demokrasi adalah refleksi dari nilai-nilai demokratis mendasar dan melibatkan sebuah filosofi di mana anggota dari sebuah masyarakat demokratis percaya jika perlu ada langkah membatasi beberapa hak dan kebebasan untuk melindungi institusi pemerintahan⁶⁸.

Bagaimana Demokrasi Bisa Diperjuangkan?

Belakangan, kebebasan semakin sering dibatasi bagi orang-orang yang ingin menyuarakan kegelisahan mereka, berkumpul bersama, dan menyelesaikan permasalahan itu bersama para pemangku kepentingan yang ada. Hal ini benar terjadi dalam ruang fisik maupun digital di bawah naungan rezim otoriter, dan juga di bawah demokrasi yang baru maupun sudah terbentuk lama di mana pandangan minoritas perlahan-lahan dipojokkan. Sebagai akibatnya, warga negara mempunyai pengaruh yang semakin kecil dalam proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka dan mungkin tidak dapat mendakwa pemerintah atas perbuatan yang mereka lakukan.

Prinsip Kunci yang Menyokong Perjuangan Demokrasi

Sebelum memperjuangkan demokrasi dari penurunan atau kemunduran, sebelumnya kita harus memahami konsep tersebut. Prinsip mendasar dapat ditemukan dalam kutipan Abraham Lincoln pada tahun 1863 ketika ia mendeklarasikan bahwa demokrasi haruslah sebuah “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat.” Ini bisa dipahami sebagai berikut:

- “oleh” di mana kuasa berasal dari rakyat. Karena itu, warga adalah

kuasa daulat yang melaksanakan kuasa atau memberikan mandat untuk menggunakan kuasa, artinya mereka yang berada pada otoritas bisa didakwa atas tindakannya oleh rakyat;

- “dari” di mana kuasa dilaksanakan lewat perwakilan terpilih atau secara langsung oleh rakyat; dan
- “bagi” di mana kuasa dilaksanakan untuk melayani kepentingan rakyat, yakni, kebaikan bersama.

Definisi ini dapat dipahami dan dikaitkan dengan cara-cara berbeda. Pemikir politik dalam tradisi Rousseau (filsuf Jenewa) bersikeras akan perlunya kuasa langsung oleh rakyat (identitas mereka yang diperintah dan pemerintah). Karenanya, rakyat memutuskan segalanya dan tidak terikat oleh hukum apapun.

Sebaliknya, pemikir politik dalam tradisi John Locke pada Pencerahan abad ke- 18, menekankan persaingan antara kepentingan-kepentingan berbeda dalam masyarakat plural; dalam kerangka konstitusional, kelompok-kelompok inilah yang harus membuat kesepakatan dalam penentuan keputusan demi kebaikan bersama.

Terlepas dari seberapa lama usia tradisi demokrasi sebuah negara telah ada atau bagaimana itu terbangun, demokrasi tidak bisa dianggap enteng begitu saja.

Di setiap negara, demokrasi dan pemahaman mendasar hak asasi manusia harus dibangun agar dapat memenuhi tantangan setiap generasi baru di mana pendidikan berdasarkan konsep kunci ini sangat penting.

Media dan Demokrasi

Jurnalisme bebas, independen, dan profesional, baik luring maupun daring, memiliki peran esensial dalam demokrasi.

- Hari Kebebasan Pers Internasional 2019, UNESCO

Artikel 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) membahas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi:

Semua orang memiliki hak berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dari luar dan mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun terlepas dari lingkungannya.

Serupa dengan ini, seperti tercantum dalam Sustainable Development Goal (SDG) Tujuan 16, perdamaian dan demokrasi adalah prasyarat untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, ketika kebebasan berekspresi dan keamanan jurnalis dilindungi, media dapat memberi peran vital dalam mencegah konflik dan dalam mendukung proses demokrasi yang damai.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi seluruh Negara Anggota PBB pada 2015, menyediakan sebuah cetak biru yang bertujuan untuk perdamaian dan kesejahteraan bagi semua orang dan planet ini, sekarang dan di masa yang akan datang. Cetak biru ini berisi 17 SDG yang meliputi panggilan darurat untuk mengambil tindakan bagi semua negara, maju maupun berkembang, untuk bekerja sama dalam ikatan global.

SDG itu sendiri merupakan gambaran sempurna potensi media untuk mempromosikan masyarakat yang damai, adil,

dan inklusif. Sebagaimana tercantum dalam SDG Target 16.10, Negara Anggota PBB diminta untuk “memastikan akses publik pada informasi dan melindungi kebebasan fundamental, selaras dengan legislasi nasional dan persetujuan internasional.”

Sebagai tambahan, dua indikator pada Target 16.10 membahas keamanan jurnalis dan jaminan legal maupun politik terhadap akses informasi. Indikator ini menunjukkan bahwa dalam agenda PBB, institusi pers yang bebas dan aman—kemampuan untuk mengakses dan membedah informasi terkait kepentingan publik

tanpa rasa takut akan serangan—adalah komponen mendasar dalam masyarakat yang damai. E-demokrasi (percampuran kata ‘elektronik’ dan ‘demokrasi’) juga dikenal sebagai demokrasi digital atau demokrasi internet dan meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam proses politik dan pemerintahan. Memadukan ICT abad 21 dalam mempromosikan demokrasi, penggunaan alat seperti ini melibatkan teknologi sipil dan pemerintahan. Namun, ini hanya bisa dilakukan dengan syarat semua warga dewasa dapat berpartisipasi secara setara dalam pengajuan, pembuatan, dan penyusunan hukum⁷³.

Dengan kata lain, e-demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang mendorong adanya praktik politik penentuan nasib diri sendiri yang bebas dan setara. Sebagaimana disebutkan Sharique Hassan Manazir, yang berarti inklusi digital merupakan kewajiban inheren dari e-demokrasi.⁷⁴ Inklusi digital penting bagi partisipasi rakyat

dalam pengembangan kebijakan publik untuk adanya demokrasi digital yang sehat lewat partisipasi setara seluruh sektor masyarakat dalam demokrasi apapun terlepas dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, gender, agama, warna kulit, ras, bahasa, kesehatan mental maupun fisik seseorang. Setiap kebijakan publik yang dikembangkan tanpa meliputi bagian tertentu dari masyarakat akan selalu bersifat non- inklusif, bertentangan dengan etos demokrasi itu sendiri.⁷⁵

Memperjuangkan Demokrasi Lewat Ruang Digital

Kemunculan dan perluasan cepat dari ruang daring telah menciptakan peluang bagi advokat dan warga biasa dalam masyarakat yang relatif dekat untuk menikmati kebebasan berkumpul dan membangun kedekatan dalam ruang daring. Sayangnya, kebebasan ini sekarang mulai dibatasi secara sistematis karena pemerintah otoriter dengan agresif menutup akses ke website, mematikan internet, menyadap pengguna, dan menghukum rakyat atas aktivitas daring mereka. Akan tetapi, untuk memperjuangkan demokrasi, calon NEGDA (generasi selanjutnya advokat demokrasi) harus tahu cara terbaik yang bisa dipakai dalam menggunakan sumber daya terbatas, baik dalam ruang fisik maupun digital.

Menggunakan Media Sosial untuk Memperkuat Demokrasi

Menurut para ahli, media sosial harus disertai dengan pergerakan akar rumput yang nyata. Media sosial di beberapa bagian Asia Tenggara—merupakan tren yang disebut oleh

advokat demokrasi sebagai alat yang membantu dalam promosi pemerintahan yang lebih terbuka. Sebagai contoh, Chee Siok Chun, salah satu pemimpin oposisi, Singapore Democratic Party, menyebut bahwa partai politik beliau adalah yang pertama menggunakan Twitter tahun 2008 dan menyebarkan pesan mereka lewat Youtube dan Facebook.⁷⁶

Mirip dengan itu, meskipun tidak murni demokratis, pergerakan/protes 'Jalan Aman' pada Agustus 2018 digalang oleh murid SMA dan mahasiswa (usia 12-22) di Bangladesh. Meskipun hanya berjalan selama sembilan hari, bentuk protes yang belum pernah terjadi tersebut membawa perubahan revolusioner dalam sistem transportasi di negara itu dan diawali oleh pesan di Facebook.

Mengapa Perlu Memperkokoh Demokrasi?

Tentu saja, demokrasi memiliki kelemahan. Partai dan politisi cenderung mengorbankan tujuan jangka panjang demi kesuksesan dalam pemilu. Demokrasi menciptakan insentif bagi pembuatan kebijakan yang tidak berorientasi jangka panjang, sebagai contoh dengan mengorbankan lingkungan atau nasib generasi masa depan ("memperburuk keadaan").

Ditambah lagi, ide mengenai pemerintahan bagi rakyat secara umum hanya terikat pada sistem negara bagian. Peningkatan ketergantungan global seperti pada pembangunan ekonomi dan lingkungan, membatasi lingkup pengaruh pembuatan keputusan demokratis di sistem negara bagian.⁷⁷

Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

Mengapa Perempuan, Perdamaian, & Keamanan?

“Pembunuhan paling banyak dilakukan pria—dan yang terbunuh paling banyak adalah perempuan.”

- Theresa Wolfwood, *Resistance is Creative: False Options and Real Hope* (2001)

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, perempuan seringkali menjadi target pertama dan termudah dalam proyek fundamentalis mana pun dan pada bentuk perang atau konflik apapun. Namun dalam dunia patriarki ini, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga mereka, komunitas mereka, negara mereka, dan kebijakan serta praktik internasional. Perempuan yang mewakili jumlah besar dalam populasi dunia juga seringkali harus menghadapi siksaan, teror, dan pembunuhan atas alasan sekedar menjadi perempuan dan terlihat rentan.

Suara dan perspektif perempuan juga telah lama diabaikan dari diskusi mengenai konflik, kelestarian, ekonomi, dan masih banyak lagi. Perempuan pemimpin perdamaian seringkali dihalangi dari menggunakan kepemimpinannya karena struktur sosial yang bersifat diskriminatif. Ketika perempuan pemimpin perdamaian mengajukan analisis dan saran pada proses PBB atau proses perdamaian, seringkali saran ini dipinggirkan atau diabaikan.

Agensi, suara, dan kapasitas perempuan, sebagaimana juga perspektif gender sejati penting bagi dialog lokal, kebijakan yang lebih baik, dan persetujuan perdamaian yang lebih adil. Perdamaian

yang bertahan lama memerlukan suara dan partisipasi dari semua anggota masyarakat, dan tidak akan pernah bisa dicapai tanpa perempuan, yang mewakili setengah populasi dunia.

Memperkenalkan United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 Women, Peace and Security Agenda

Agenda Women, Peace and Security Agenda (WPS) bermula dengan disahkannya resolusi UNSCR 1325 pada tahun 2000. Isi dari resolusi ini adalah kejadian bersejarah yang mengakui peran penting perempuan dan perspektif gender dalam pembangunan perdamaian, pencegahan konflik, resolusi konflik, dan perbaikan pasca-konflik dan upaya rekonstruksi. Semenjak momen itu ada 9 resolusi lain yang telah disahkan, yang memperkuat resolusi pertama terutama soal partisipasi setara dan bermakna perempuan dan keterlibatan dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan.

Tidak seperti Resolusi lain, UNSCR 1325 disahkan lewat proses kajian ulang tahunan yang menyediakan kesempatan penting untuk keterlibatan lebih dan pembaharuan komitmen pada perempuan, agenda Perdamaian dan Keamanan.

Akan tetapi, studi menemukan bahwa implementasi UNSCR 1325 tidak begitu menggembirakan. Hingga saat ini, hanya 41 persen Negara Anggota yang telah mengadopsi rancangan aksi nasional terkait perempuan dan perdamaian dan keamanan, dan hanya 22 persen dari seluruh rencana mendapatkan anggaran untuk implementasi program.

Kurang dari 20 persen dari seluruh resolusi Dewan Keamanan pada 2018 berisi referensi pada pentingnya memastikan hak-hak mendasar dan kebebasan bagi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan pembela hak asasi perempuan.

Pergerakan perempuan dan feminis telah meminta implementasi nyata dari UNSCR 1325 dan menuntut pemerintah, PBB, masyarakat sipil, dan pelaku lain untuk mengambil tindakan.

Studi kasus soal perempuan yang berjuang demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Asia.

Timor Leste & Nepal

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting di Timor Leste, di mana pria dan perempuan membangun fondasi ekonomi dan sosial untuk masyarakat yang stabil dan institusi yang kokoh, setelah dua puluh empat tahun perjuangan mendapatkan kemerdekaan yang merenggut nyawa 183.000 orang Timor. Selama pendudukan Indonesia di Timor Leste sejak 1975 hingga 1999, para perempuan menjadi pejuang gerilya dan anggota organisasi milisi.

Di Timor Leste dan luar negeri, mereka berjuang melawan penjajahan Indonesia. Mereka membawa makanan, amunisi, dan pesan bagi para pejuang, dan memberikan mereka tempat berlindung. Namun organisasi perempuan juga berkontribusi dengan melatih perempuan bertahan hidup dan mengajarkan keterampilan umum. Para perempuan Timor Leste punya peran besar dalam inisiatif rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian

setelahnya. Mereka ingin negara mereka belajar dari sejarah agar dapat melalui masa depan yang lebih damai dan stabil.

Mengikuti kemerdekaannya, di seluruh Timor Leste, para perempuan memimpin inisiatif rekonsiliasi akar rumput, dan mereka merambah ke koridor kuasa. Partisipasi politik perempuan di Timor Leste sekarang mencapai 40 persen anggota parlemen, adalah yang tertinggi di Asia. Perempuan juga memimpin kementerian keuangan, keadilan dan solidaritas sosial. Di seluruh negara ini, perempuan mengambil peranan penting pada tingkat nasional, perkotaan, dan pedesaan untuk menangani masalah kekerasan domestik, kesulitan ekonomi, dan isu-isu lain yang memengaruhi perempuan dan populasi dalam jumlah besar.

- Studi kasus diambil dari Haq. Ameera, Peran Perempuan dalam Menciptakan dan Membangun Perdamaian.

10 tahun perang sipil di Nepal melibatkan kelompok-kelompok etnis secara luas di sebagian besar wilayah, memengaruhi aspek ekonomi, politik, dan sosial negara selama konflik terjadi dan tahun-tahun sesudahnya. Selama konflik, perempuan dilaporkan mencakup sepertiga anggota milisi Maoist di beberapa wilayah dan 50% di area yang lebih ramai. Kadet Maoist disebut mengambil berbagai peran mulai dari petarung, penyelenggara, penggerak, pelatih, pengemudi, pengintai, tukang masak, suster, mata-mata, dan anggota tentara budaya.

Keberhasilan mobilisasi perempuan yang dilakukan Maoist selama konflik telah memperkuat mobilisasi politik perempuan pada politik pasca-konflik. Menjelang akhir

Apa itu Hak Asasi Manusia?

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia menjamin:

... bahwa seorang manusia akan sepenuhnya bisa mengembangkan dan menggunakan kualitas kemanusiaannya seperti kecerdasan, bakat, dan hati nuraninya dan memenuhi kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan lainnya.

Hal-hal ini adalah standar minimum yang dibutuhkan bagi manusia untuk hidup dengan martabat.

Hak asasi manusia menjamin masyarakat atas sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mereka dapat memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada secara maksimal. Pada akhirnya, dengan menjamin kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan, hak asasi manusia melindungi masyarakat dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih berkuasa.

Karakter-Karakter Dasar Hak Asasi Manusia



Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban negara untuk bertindak dengan cara-cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental individu atau kelompok.

Salah satu pencapaian terbaik dari PBB adalah pembentukan sebuah hukum hak asasi manusia yang komprehensif—sebuah hukum yang universal dan dilindungi secara internasional yang dapat diikuti oleh seluruh negara dan dicita-citakan oleh semua orang. PBB telah menetapkan berbagai hak yang diterima secara

internasional, termasuk hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. PBB juga telah menetapkan mekanisme untuk memajukan dan melindungi hak-hak tersebut dan untuk membantu negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Dasar dari hukum ini adalah Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB masing-masing pada 1945 dan 1948. Sejak saat itu, PBB secara berkala telah memperluas hukum hak asasi manusia untuk mencakup standar khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok rentan lainnya, yang saat ini seluruhnya memiliki hak untuk melindungi mereka dari diskriminasi yang telah lama menjadi umum di masyarakat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dokumen internasional pertama yang menjabarkan hak-hak dasar sipil, sosial dan budaya yang harus dinikmati oleh seluruh manusia. Deklarasi ini diratifikasi tanpa oposisi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah dokumen yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah hak asasi manusia. Disusun oleh para perwakilan dari latar belakang hukum dan budaya dari seluruh wilayah di dunia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB di Paris pada 10 Desember 1948 oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) sebagai sebuah pencapaian bersama semua orang dan bangsa. Ini mengatur, untuk pertama kalinya, hak asasi manusia fundamental

yang dilindungi secara universal. Sejak pengesahannya pada 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah diterjemahkan ke lebih dari 500 bahasa—ini adalah dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia—dan telah mengilhami konstitusi banyak negara yang baru merdeka dan negara demokrasi baru.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bersama dengan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan kedua Protokol Opsional (tentang prosedur pengaduan dan hukuman mati) dan Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Protokol Opsional, membentuk International Bill of Human Rights.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 1. Kita semua terlahir bebas dengan hak yang setara | 2. Kita memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi | 3. Kita memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan | 4. Kita memiliki hak untuk bebas dari perbudakan | 5. Kita memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan |
| 6. Kita memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh hukum | 7. Kita memiliki hak yang setara untuk dilindungi oleh hukum | 8. Kita memiliki hak untuk mencari keadilan | 9. Kita memiliki hak untuk bebas dari penahanan dan pengasingan yang tidak adil | 10. Kita memiliki hak atas persidangan dan audiensi publik |
| 11. Kita memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai | 12. Kita memiliki hak atas privasi dan kebebasan dari serangan terhadap | 13. Kita memiliki hak atas kebebasan untuk pindah | 14. Kita memiliki hak atas perlindungan dari persekusi di negara lain | 15. Kita memiliki hak untuk menjadi bagian dari suatu negara |
| 16. Kita memiliki hak untuk menikah | 17. Kita memiliki hak untuk memiliki barang-barang | 18. Kita memiliki hak atas pikiran dan agama kita sendiri | 19. Kita memiliki hak untuk berpikir dan berpendapat sesuai yang kita inginkan | 20. Kita memiliki hak untuk berkumpul secara damai |
| 21. Kita memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan pemilu | 22. Kita memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan pemilu | 23. Kita memiliki hak untuk bekerja dan bergabung dalam serikat | 24. Kita memiliki hak untuk bekerja dan bergabung dalam serikat | 25. Kita memiliki hak atas kesehatan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal |
| 26. Kita memiliki hak atas pendidikan | 27. Kita memiliki hak untuk menikmati seni dan ilmu pengetahuan | 28. Kita memiliki hak untuk menikmati sebuah dunia yang bebas dan adil | 29. Kita memiliki tanggung jawab dalam komunitas kita | 30. Tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hak asasi manusia kita |

International Bill of Human Rights

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mulai berlaku pada 1976. Di antara hak asasi manusia yang ingin dipromosikan dan dilindungi adalah:

- Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan;
- Hak atas perlindungan sosial, untuk sebuah standar kehidupan yang layak dan untuk mencapai standar kesejahteraan fisik dan mental yang tertinggi;
- Hak atas pendidikan dan menikmati manfaat dari kebebasan budaya dan perkembangan saintifik.

Hak-Hak Sipil dan Politik

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Protokol Opsional Pertama-nya mulai berlaku pada 1976. Protokol Opsional Kedua berlaku pada 1989. Di antara hak asasi manusia yang dicakup oleh ICCPR adalah:

- Kebebasan dalam bertindak;
- Kesetaraan di mata hukum;
- Hak atas sebuah pengadilan yang adil dan praduga tak bersalah;
- Kebebasan dalam berpikir, hati nurani, dan beragama;
- Kebebasan dalam beropini dan berekspresi;

- Pertemuan yang damai;
- Kebebasan berserikat;
- Berpartisipasi dalam kepentingan umum dan pemilu; dan
- Perlindungan atas hak minoritas

Lebih lanjut lagi, ini melarang perampasan kehidupan secara sewenang-wenang; penyiksaan, hukuman yang kejam atau perlakuan yang merendahkan; perbudakan dan kerja paksa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi; propaganda perang; diskriminasi; dan advokasi kebencian terhadap ras dan agama. Penting untuk dicatat bahwa ICESCR dan ICCPR tidak seharusnya diperlakukan sebagai dokumen yang terpisah, karena keduanya saling berhubungan.



- Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi
- Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi
- Hak atas kesetaraan di mata hukum
- Hak atas pengadilan yang adil
- Hak atas privasi
- Kebebasan beragama dan kepercayaan
- Kebebasan berpendapat
- Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai
- Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- Hak atas jaminan sosial
- Hak untuk bekerja
- Hak atas standar kehidupan yang layak
- Hak atas pendidikan
- Hak atas kesehatan
- Hak atas makanan dan tempat tinggal

Pemilihan Umum dan Demokrasi

Hakikat demokrasi bersumber dari hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Demokrasi didefinisikan sebagai sebuah prinsip di mana warga negara secara sukarela memberi persetujuannya untuk diatur dengan cara membentuk sebuah pemerintahan melalui pemilihan umum, dan untuk mendirikan pemerintahan yang menjalankan kewenangannya dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya.

Ada banyak cara yang membuat masyarakat dapat menjalankan hak demokratisnya, contohnya dengan berpartisipasi pada audiensi publik, lobi-lobi legislatif, protes, dan referendum. Namun, yang paling penting dan mendasar dari proses-proses ini adalah berpartisipasi secara bebas dalam pemilihan umum, baik sebagai kandidat atau seorang pemilih. Berpartisipasi dalam pemilu menjadi sebuah hak dalam kategori khusus yang disebut hak pilih dan dijamin oleh ICCPR

Pasal 25(b), dan konvensi internasional lainnya. Sebuah proses pemilu demokratis yang murni membutuhkan suasana yang kondusif terhadap hak untuk berkumpul, berserikat, mengekspresikan diri, dan tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara.

ICCPR menangani konsep-konsep yang harus menjadi ciri-ciri proses pemilu yang murni (lihat daftar di bagian kiri pada kotak di bawah). Lebih lanjut lagi, ICCPR didukung dan ditambah lagi oleh instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang menetapkan kerangka kerja pemilu yang murni (lihat daftarnya di bagian kanan pada kotak di bawah).

Instrumen Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan Pemilihan Umum

Internasional:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Pasal 21
- ICCPR (1966), Pasal 25 dan Komentar Umum No. 25

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (1979), Pasal 7
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) (1965), Pasal 5
- Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPWD) (2008), Pasal 29
- Buku Saku PBB tentang Pemilu yang Murni (1989)

Regional:

AFRICA: Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (1981), Pasal 13; Deklarasi Uni Afrika tentang Prinsip Tata Kelola Pemilu Demokratis di Afrika (2002) dan Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Pemerintahan (2007).

EUROPE: Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), sebelumnya adalah Konvensi untuk Perlindungan atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (1949-1950) yang memiliki sebuah pendekatan atas-bawah dan mewajibkan negara untuk mengakui pemilihan umum (Protokol 1, Pasal 3); dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) Dokumen Copenhagen (1991).

AMERIKA: Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) (1948); Deklarasi Amerika atas Hak dan Kewajiban Manusia (1948), Pasal XX; dan Piagam Demokratik Inter-Amerika (2001).

Sebagaimana telah ditentukan di atas, instrumen antar pemerintah regional di Afrika, Eropa, dan Amerika juga menetapkan standar minimum tentang bagaimana negara anggota harus

melaksanakan pemilihan umum. Di Asia, organisasi masyarakat sipil menjadi ujung tombak pembuatan standar pemilu seperti yang terlihat dalam Deklarasi Bangkok tentang Pemilu yang Bebas dan Adil (2012).

Standar-standar ini digunakan sebagai sebuah tolak ukur untuk menilai proses pemilu oleh masyarakat sipil dan organisasi antar pemerintah melalui misi pemantauan pemilu.

Kehadiran banyak konvensi internasional yang membahas pemilu menunjukkan bahwa pemilu adalah proses penting yang membutuhkan banyak pengawasan. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kita membutuhkan pemilu, dan mengapa penting untuk berpartisipasi dalam pemilu? Handout #50 di bawah ini menunjukkan beberapa alasan mengapa warga negara harus berpartisipasi dalam pemilihan dan memelihara demokrasi.

Dari sekian banyak miskonsepsi tentang pemilu adalah anggapan bahwa ini hanya sebuah urusan satu hari saja. Sebenarnya, seluruh proses pemilu dapat terjadi dalam rentang waktu berbulan-bulan atau selama bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitasnya, baik secara logistik maupun prosedural. Proses seperti itu digambarkan dengan sebuah grafik yang disebut siklus .

Mengapa Warga Negara Harus Berpartisipasi dalam Pemilihan Umum

- Untuk memastikan legitimasi pemerintah: Menjamin mereka yang berada di pemerintahan diberikan persetujuan untuk membuat dan menerapkan hukum dan kebijakan atas nama warga negara.
- Untuk menempatkan para pemimpin akuntabel di pemerintahan: Mendorong para pemimpin politik untuk benar-benar bekerja demi kesejahteraan rakyat jika mereka ingin terus mengabdikan, dan mencegah mereka yang melakukan sebaliknya untuk menduduki posisi kekuasaan.
- Untuk menjauhkan diri dari otoritarianisme: Pemilu yang benar dan diadakan secara berkala menjamin bahwa tidak ada seorangpun atau entitas apapun yang memiliki kekuatan untuk menyalahgunakan otoritas pemerintah untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- Untuk menjamin transisi yang damai: Pemilu memastikan pemerintahan yang berkelanjutan, dan supaya transfer kekuasaan antar pemimpin tidak melalui pertumpahan darah dan kekecauan.
- Untuk menyediakan sebuah jalan yang inklusif dan demokratis dalam memilih pemimpin: Pemilu menjamin bahwa pejabat pemerintah dan kebijakan pemerintah mewakili suara, serta mengatasi masalah, dari setiap anggota masyarakat, dan bukan hanya beberapa aktor yang berkuasa saja.

Siklus Elektoral

Siklus Pemilu terdiri dari tiga fase, yaitu periode pra-pemilu, periode pemilu, dan periode pasca-pemilu. Dalam tiap periode, ada beberapa kegiatan spesifik yang harus dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Prinsip Inti dari Pemilu Demokratis

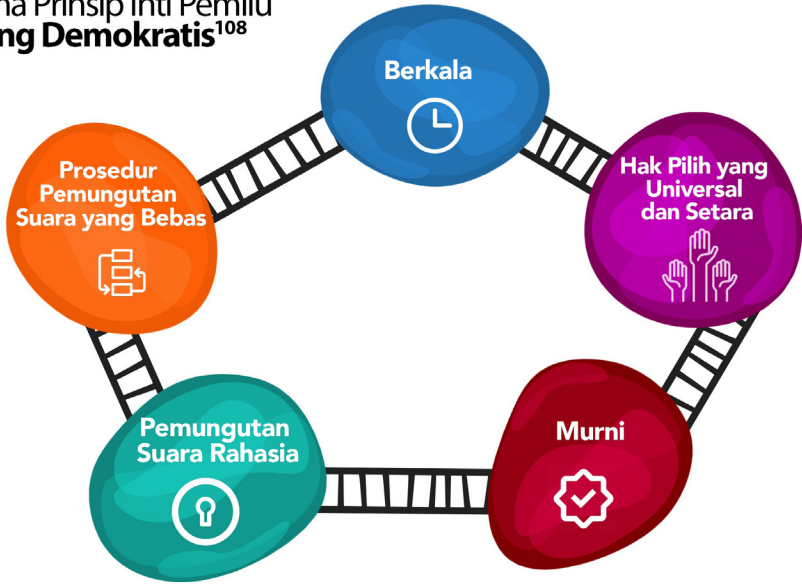
Pasal 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan sebuah rangkaian prinsip inti untuk pemilu demokratis di dalam proses pemilu:

Semua orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang terpilih secara bebas.

Semua orang memiliki akses yang setara terhadap pelayanan publik di negaranya. Kehendak masyarakat harus menjadi dasar dari otoritas pemerintahan; ini akan diekspresikan dalam pemilu secara berkala dan murni yang harus dengan hak pilih universal dan setara, dan akan diadakan dengan pemungutan suara secara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Prinsip-prinsip tersebut adalah standar minimum yang harus berusaha ditegakkan oleh setiap pemilihan umum. Tentu saja, pemilu yang tidak menegakkan banyak atau seluruh prinsip tersebut akan menuai kritik sebagai pemilu yang tidak demokratis. Handout #52 menyajikan lima prinsip inti dari pemilu yang demokratis.

Lima Prinsip Inti Pemilu yang Demokratis¹⁰⁸



Berkala: Tetapkan periode waktu untuk pemilihan umum. Pemilu harus teratur dan tidak dapat diubah dengan mudah.

Murni : Perubahan yang murni harus menjadi kemungkinan – pemerintah harus dapat berubah tergantung pada hasil pemilu. Kesamaan ini berlaku pada kompetensi dari penyelenggara pemilu – perubahan harus dimungkinkan melalui sebuah pemilu yang murni dan diselenggarakan dengan baik.

Hak Pilih yang Universal, Inklusif, Aksesibel, dan Setara: Setiap dan seluruh warga negara harus memiliki kemampuan untuk memilih, terlepas dari status sosial, tingkat pendidikan, atau aspek personal apapun dari diri mereka. Secara setara, kemampuan

untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih yang berhak tidak boleh dipengaruhi apapun selain usia dan kewarganegaraan.

Prosedur Pemungutan Suara yang Bebas: Meskipun ini sebagian besar adalah pemungutan suara rahasia (lihat di bawah), pilihan pemungutan suara lainnya diperbolehkan selama mereka sepenuhnya bebas. Bebas dalam konteks ini dapat dipahami dalam dua cara. Pertama, individu tidak seharusnya dapat dipersekusi atau dicegah dari menggunakan preferensi pemungutan suara mereka. Kedua, pemilu harus transparan dalam arti bahwa mereka dapat dicek integritasnya.

Pemungutan Suara yang Rahasia: Kerahasiaan surat suara artinya bahwa tidak seorangpun atau kelompok apapun, baik privat maupun publik termasuk penyelenggara pemilu, dapat menyaksikan bagaimana seseorang memberikan hak pilihnya dalam kotak pemilihan. Klausul ini dimasukkan sebagai prosedur pemungutan suara yang ideal untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memilih siapa yang mereka pilih tanpa takut akan dampak dari teman, keluarga, atau bahkan pemerintah.

Kelima prinsip inti pemilu yang demokratis ini secara lebih jauh dapat diekstrapolasi lebih lanjut ke standar minimum berikut:

- Tatakelola pemilu yang komprehensif memastikan tingkat permainan yang setara – tidak ada undang-undang atau peraturan yang dapat membatasi hak kandidat dan pemilih;
- Daya saing, sistem multi partai – berbagai partai politik yang independen harus mampu bersaing secara adil, dengan tidak ada pihak yang memiliki keunggulan yang

tidak semestinya atas pihak lain;

- Kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul saat pemilu – hak-hak fundamental warga negara dilindungi selama proses pemilu;
- Badan penyelenggara pemilu yang profesional – komisi-komisi pemilu harus mampu melaksanakan prosedur pemilu dengan adil, transparan, dan independen;
- Keterlibatan masyarakat sipil dan pemantau pemilu yang bersemangat – organisasi masyarakat sipil secara independen bebas melaksanakan aktivitasnya termasuk edukasi, observasi pemilu, dan aktivitas lain tanpa rintangan yang tidak semestinya;
- Inklusivitas kelompok marjinal – pemilu harus memberi pijakan yang sama bagi seluruh kelompok, dan kerugian apapun yang dimiliki oleh sektor yang terpinggirkan selama proses pemilu harus ditangani;
- Proses pemilu yang kredibel – proses pemilu harus transparan dan akuntabel di seluruh langkah dalam prosesnya; dan
- Sistem dan pemulihan pemilu yang adil dan tepat waktu – sengketa yang muncul selama masa pemilu harus ditangani secara transparan, adil, dan tepat waktu oleh sebuah badan yang kredibel.

Sistem Pemilihan Umum

Meskipun setiap pemilu menampilkan hampir seluruh kegiatan yang disebutkan di atas, ada banyak konfigurasi tentang bagaimana kegiatan tersebut dilakukan yang mana bervariasi mulai dari kompleksitasnya, tergantung pada tuntutan sistem pemilu. Sebuah sistem pemilu didefinisikan sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana proses pemilu dilaksanakan, bagaimana suara dihitung, dan bagaimana para pemenang ditentukan. Beberapa negara menggunakan matematik yang rumit untuk menghitung suara, sementara yang lainnya menggunakan metode yang lebih sederhana. Di bawah ini adalah beberapa tipe paling umum dari sistem pemilu:

Sistem plural – kandidat dengan suara paling tinggi yang menang (Bagaimana supaya menang: dapatkan suara tertinggi).

Sistem mayoritas – membutuhkan seorang kandidat untuk mengumpulkan, dalam kebanyakan kasus, setidaknya nyaris seluruh suara. Dalam sistem ini, pemilih biasanya diminta untuk mengurutkan para kandidat dalam surat suara sesuai dengan preferensi mereka, yang nantinya akan dihitung dalam satu atau beberapa ronde (Bagaimana supaya menang: dapatkan 50% + 1 suara dalam tiap ronde).

Sistem proporsional – kursi-kursi di badan legislatif dialokasikan tergantung dari pembagian suara yang diterima oleh tiap kandidat atau partai dalam sebuah pemilu (Bagaimana supaya menang: dapatkan n% suara untuk mendapatkan% kursi legislatif).

Untuk menyelenggarakan pemilu dan menjamin bahwa seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh tradisi politik dan hukum, negara biasanya membentuk sebuah badan penyelenggara pemilu atau dalam istilah yang lebih sederhana, komisi pemilihan umum, yang anggotanya biasanya ditunjuk oleh otoritas eksekutif dan/atau badan legislatif. Penyelenggara pemilu melaksanakan pengambilan keputusan yang penting yang mana menyentuh kegiatan pemilu yang penting seperti mengawasi tingkah laku partai politik, kampanye, dan keuangan pemilu. Dengan demikian, berbagai konfigurasi mengenai komposisi dan struktur komisi pemilu bervariasi dari satu negara dan negara lain untuk menjamin administrasi pemilu yang adil. Komisi pemilihan umum dapat berupa salah satu dari di bawah ini:

- Komisi pemilu berbasis multi partai – terdiri dari perwakilan partai politik.
- Komisi pemilu berbasis ahli – keanggotaannya ditunjuk berdasarkan keahlian profesional (akademisi, organisasi masyarakat sipil, pengadilan, media, dan administrator publik).
- Komisi pemilu campuran – sebuah kombinasi dari dua klasifikasi di atas.

Lekat dengan seluruh proses politik, sengketa di antara berbagai pemangku kepentingan pasti akan muncul. Dengan demikian, undang-undang dan lembaga yang diamanatkan untuk mengimplementasikannya harus dilengkapi dengan baik

dan independen untuk memastikan bahwa keadilan pemilu dijalankan.

Keadilan pemilu melibatkan penyelesaian sengketa yang efektif dan tepat waktu termasuk penyediaan pemulihan untuk masalah yang memengaruhi integritas pemilu. Keadilan pemilu juga harus menyelesaikan inkonsistensi dalam kebijakan dan hukum yang menghambat pemilu yang akuntabel, inklusif, adil, damai, dan transparan untuk memenuhi kewajiban hukum publik internasional dan regional. Penyelesaian dari sengketa pemilu biasanya terjadi di pengadilan yudisial atau dalam komisi pemilihan.

Proses pemilu adalah sebuah penyeimbang – di mata kotak suara setiap orang adalah setara terlepas dari status sosio ekonomi dan afiliasi politiknya. Dengan demikian, seluruh pemangku kebijakan harus berupaya untuk memberikan kesetaraan dan mengurangi pengecualian di sektor-sektor yang rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, orang lanjut usia, pekerja migran, dan orang-orang yang dirampas kebebasannya, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan penuh makna di dalam pemilu. Karena itu, adalah sebuah kewajiban dari komisi pemilihan umum untuk mendengar para perwakilan dari sektor-sektor ini melalui dialog dan koordinasi yang konstan dan melibatkan mereka dalam konsultasi tentang pelaksanaan pemilu.

Supaya berfungsi sebagai sebuah mekanisme pemeriksa dan penyeimbang dari kekuatan yang dimiliki oleh komisi pemilu selama masa pemilu, organisasi masyarakat sipil dapat melakukan sebuah proses yang disebut pemantauan pemilu.

Pemantauan pemilu adalah sebuah proses yang memeriksa seluruh rangkaian siklus pemilu sebagai kepatuhan terhadap kewajiban internasional. Aktor-aktor masyarakat sipil yang melakukan audit ini disebut sebagai pemantau pemilu dan dianggap sebagai pembela hak asasi manusia khusus yang berfokus pada hak pilih. Pemantau pemilu bisa merupakan para pengamat pemilu internasional yang anggotanya didaulat dari negara lain, atau pemantau pemilu domestik yang anggotanya adalah warga negara dari negara yang mengadakan pemilu. Peran mereka adalah mengadvokasi reformasi dan menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilu.

Untuk menjamin sebuah demokrasi yang dinamis, semua orang harus berjuang untuk melindungi hak orang lain untuk memilih, karena ini adalah sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam urusan pemerintah. Secara khusus, pemberdayaan politik perempuan adalah hal penting yang pengambilan keputusannya harus dijamin kredibel dan sah, dan ini mensyaratkan kesetaraan gender. Sebuah pemilihan umum secara esensial menetapkan prioritas dan nilai sebuah negara dan mempersonifikasikan mereka melalui para pemimpin yang terpilih, individu mendaftarkan dukungannya untuk nilai-nilai yang demokratis.

Memahami Pemerintahan Demokratis Mendefinisikan Pemerintahan

Tidak ada satu definisi tunggal dan lengkap tentang 'tata kelola pemerintahan yang baik,' juga tidak ada batasan ruang lingkupnya yang memerintahkan penerimaan universal. Istilah ini digunakan dengan fleksibilitas yang luar biasa; ini adalah sebuah kelebihan, tetapi juga sebuah sumber dari beberapa kesulitan pada tingkat operasional. Tergantung pada konteks dan tujuan utama yang dicari, Pemerintahan yang Demokratis telah berulang kali dikatakan untuk mengikuti ciri-ciri berikut ini (lihat Handout #63 di bawah):



Namun, terdapat tingkat kesepakatan yang signifikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan proses dan hasil kelembagaan dan politik yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pembangunan.

Telah dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah proses di mana lembaga-lembaga publik melaksanakan kepentingan publik, mengatur sumber daya publik, dan menjamin realisasi hak asasi manusia dengan cara yang pada dasarnya bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, dan dengan memperhatikan supremasi hukum.

Ujian sebenarnya dari pemerintahan 'yang baik' adalah sejauh mana ia memenuhi janji hak asasi manusia: hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Pertanyaan kunci adalah: Apakah lembaga-lembaga pemerintahan secara efektif menjamin hak terhadap kesehatan, perumahan yang layak, makanan yang cukup, pendidikan berkualitas, peradilan yang adil, dan keamanan pribadi?

Atribut-Atribut

Kunci Pemerintahan Demokratis

110



Konsep tata kelola pemerintahan yang baik telah diklarifikasi oleh Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Resolusi 2000/64, Komisi mengidentifikasi atribut-atribut kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dapat dilihat di bawah ini.

Tautan antara Pemerintahan Demokratis dan Hak Asasi Manusia¹¹¹

Pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia itu saling menguatkan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menyediakan seperangkat nilai untuk memandu pekerjaan pemerintah dan aktor politik dan sosial lainnya. Mereka juga menyediakan seperangkat standar kinerja yang dengannya para aktor ini dapat dimintai pertanggung jawaban. Lebih lanjut, prinsip-prinsip hak asasi manusia menginformasikan isi dari upaya-upaya pemerintahan demokratis: mereka mungkin menginformasikan pembangunan dari kerangka legislatif, kebijakan, program, alokasi anggaran, dan pengukuran lainnya.

Di sisi lain, tanpa pemerintahan demokratis, hak asasi manusia tidak dapat dihormati dan dilindungi secara berkelanjutan. Implementasi dari hak asasi manusia bergantung pada sebuah lingkungan yang kondusif dan mendukung. Ini termasuk kerangka hukum yang pantas, dan proses administrasi yang bertanggung jawab untuk merespon kepada hak-hak dan kebutuhan masyarakat.

Tautan antara pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia dapat diatur di sekitar empat area:



Pemerintahan Demokratis, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan

Interkoneksi antara pemerintahan demokratis, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan dibuat secara langsung dan tidak langsung oleh komunitas internasional seperti yang dinyatakan dalam beberapa deklarasi dan dokumen konferensi global lainnya.

Contoh, Pasal 1 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang Hak untuk Pembangunan menyatakan bahwa setiap manusia dan seluruh orang "berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi untuk, dan menikmati pembangunan ekonomi,

sosial, budaya, dan politik.”

Dalam SDGs, para pemimpin dunia telah menegaskan komitmen mereka untuk memajukan demokrasi dan memperkuat supremasi hukum serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk hak atas pembangunan.

Merujuk pada PBB, sebuah dokumen strategi inti tentang MDGs dan SDGs menyatakan bahwa “Ini harus ditempatkan dalam norma dan standar yang lebih luas dari Deklarasi Milenium,” termasuk yang tentang “hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan demokratis.”

Melalui perspektif hak asasi manusia, konsep pemerintahan demokratis dapat ditautkan dengan prinsip dan hak yang telah diatur dalam instrumen internasional hak asasi manusia: Pasal 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya pemerintahan yang partisipatif dan Pasal 28 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi dapat sepenuhnya direalisasikan.” ICCPR dan ICESCR berisi bahasa yang lebih spesifik tentang tugas dan peran pemerintah dalam menjamin penghormatan dan realisasi seluruh hak asasi manusia. Pasal 2 dari ICCPR mensyaratkan pihak negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Konvensi dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan dampak terhadap hak-hak tersebut. Secara khusus, negara harus menyediakan sebuah pemulihan yang efektif kepada individu ketika hak mereka dilanggar, dan menyediakan mekanisme yudisial atau mekanisme administratif yang adil dan efektif untuk menentukan

hak individu atau pelanggarannya. Dibawah ICESCR, negara wajib untuk mengambil langkah dengan tujuan mencapai realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam Konvensi secara progresif dengan segala cara yang sesuai.

Demikian pula, badan pemantau perjanjian hak asasi manusia telah memberikan perhatian pada berbagai elemen pemerintahan demokratis. Dengan demikian, dalam Komentar Umum No. 12, tentang hak atas makanan, Komite atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa, "Pemerintahan demokratis adalah hal yang esensial bagi terwujudnya seluruh hak asasi manusia, termasuk penghapusan kemiskinan dan penjaminan sebuah kehidupan yang memuaskan semua orang." Demikian pula, Komite Hak Anak dalam beberapa kesempatan telah membahas masalah kapasitas pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan demi kepentingan anak dan masalah desentralisasi layanan dan pembuatan kebijakan. Mereka juga menyampaikan bahwa korupsi adalah halangan terbesar dalam mencapai tujuan Konvensi.

Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Demokratis, dan Demokrasi

Nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip mengadakan pemilu secara berkala dan murni oleh hak pilih universal merupakan eManusia dan dikembangkan lebih lanjut dalam ICCPR, yang mengabadikan sejumlah hak politik dan kebebasan sipil yang menopang demokrasi yang bermakna.

Tautan antara demokrasi dan hak asasi manusia terlihat pada Pasal 21(3) dari Deklarasi Universal HAM, yang menyatakan:

Kehendak masyarakat harus menjadi basis dari otoritas pemerintah; ini harus diekspresikan dalam pemilu yang asli dan berkala yang harus berdasarkan hak pilih universal dan setara dan harus dilaksanakan oleh pemilihan yang rahasia atau oleh prosedur pemilihan bebas lainnya yang setara.

Hak-hak yang diabadikan dalam ICESCR dan instrumen hak asasi manusia berikutnya yang mencakup hak-hak kelompok tertentu (misalnya masyarakat adat, perempuan, minoritas, penyandang disabilitas, pekerja migran dan anggota keluarganya) sama pentingnya untuk demokrasi karena memastikan inklusivitas bagi semua kelompok termasuk kesetaraan dan kesetaraan dalam hal akses ke hak sipil dan politik.

Selama beberapa tahun, Majelis Umum PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya berupaya memanfaatkan instrumen hak asasi manusia internasional untuk memajukan pemahaman bersama tentang prinsip, norma, standar, dan nilai yang menjadi dasar demokrasi, dengan tujuan untuk membimbing negara-negara anggota untuk mengembangkan tradisi dan lembaga demokrasi domestik; dan untuk memenuhi komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan. Ini mengarah pada artikulasi beberapa resolusi penting dari Komisi Hak Asasi Manusia sebelumnya. Pada tahun 2000, Komisi merekomendasikan serangkaian tindakan legislatif, kelembagaan, dan praktis yang dinilai penting untuk mengkonsolidasikan demokrasi (Resolusi 2000/47¹¹²); dan pada tahun 2002, Komisi menyatakan hal-hal berikut ini sebagai elemen penting demokrasi (seperti terlihat pada Handout #69 di bawah):

Elemen-elemen Esensial Demokrasi, HAM, dan Pemerintahan Demokratis



Sejak pendiriannya di 2006, Dewan Hak Asasi Manusia (penerus Komisi) telah mengadopsi beberapa resolusi yang menyoroti hubungan yang saling bergantung dan saling memperkuat antara demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh terbaru termasuk resolusi 19/36¹³ dan 28/14¹⁴ tentang 'Hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.'

Memahami Lokalisasi/Lokalisme

Lokalisme menggambarkan berbagai filosofi politik yang memprioritaskan hal-hal lokal. Lokalisme dapat juga mengacu pada sebuah pendekatan sistematis untuk mengorganisasi sebuah pemerintahan nasional sehingga otonomi daerah dipertahankan daripada mengikuti pola sentralisasi pemerintahan dan

kekuasaan politik dari waktu ke waktu.

Pada tingkat konseptual, ada kesamaan penting antara lokalisme dan demokrasi deliberatif. Ini terutama menyangkut tujuan demokrasi untuk melibatkan warga negara dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Akibatnya, lokalisme mendorong penguatan forum demokrasi dan politik partisipatif serta memperluas konektivitas ruang publik.¹¹⁸

Apa itu Demokrasi Lokal?

Pada permulaan abad ke-21, ada sebuah kebangkitan dramatis dalam penekanannya pada demokrasi lokal. Pembaharuan ketertarikan terhadap prinsip dan prosedur pemerintahan demokratis ini pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat dalam beberapa halnya kembali ke dasar teori dan praktik demokrasi.¹¹⁹ Demokrasi lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian kekuasaan negara atau lembaga negara di tingkat lokal dan regional. Agar berhasil, profil hukum dan struktural demokrasi lokal harus ditanamkan dalam pendekatan komunitas yang lebih luas. Ini menyiratkan pendekatan partisipatif untuk pengambilan keputusan lokal, yang melibatkan berbagai orang dalam komunitas melalui praktik seperti penganggaran partisipatif di tingkat lokal atau diskusi panel warga.

Keuntungan Lokalisasi¹²⁰



Demokrasi lokal dapat dipahami dalam dua cara: Pada lembaga pemerintahan daerah, seperti walikota, dewan, kepanitiaan, dan pelayanan administrasi; dan Pada organisasi dan aktivitas masyarakat sipil.¹²¹

Idealnya, otoritas lokal dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam hubungan yang saling menguntungkan untuk memperkuat hubungan untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan solusi inovatif. Pemerintah hanyalah salah satu

bagian dari gambaran ini, meskipun sebuah hal yang penting. Gagasan tentang keterlibatan sipil—organisasi warga, asosiasi, bisnis, komite lingkungan, dan sejenisnya—juga penting dalam konsep pemerintahan lokal.

Mendefinisikan Demokrasi Lokal

Ada beberapa makna tentang demokrasi lokal dalam beberapa latar belakang, dan tidak ada konsep tunggal atau model dari bentuk yang 'terbaik'. Pada saat yang sama, sebuah pemahaman umum tentang proses esensial dari kehidupan berdemokrasi berlaku secara universal.

Demokrasi berarti harus ada pemilu secara berkala (atau reguler) dan murni dan bahwa kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui pemilihan suara yang populer dan tidak melalui kekerasan atau paksaan.

Dalam demokrasi, lawan politik dan minoritas memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya dan memiliki pengaruh (melampaui representasi belaka) dalam proses pembuatan kebijakan. Ketika pendapat minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus menjadi sah dan setia dan tidak ekstra- institusional dan tidak melakukan kekerasan.

Harus ada sebuah peluang untuk alternatif dalam

mengelola koalisi; yaitu, pemilih harus mampu menurunkan beberapa politisi dari jabatannya dan menggantinya dengan kepemimpinan yang baru.

Demokrasi berarti ada penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik dasar.

Dan, meskipun kontroversial, banyak yang percaya bahwa demokrasi memerlukan hak-hak pembangunan, ekonomi, dan lingkungan tertentu seperti air bersih, perumahan, dan kesempatan kerja.¹²²

Lebih lanjut, diskusi mengenai makna dari demokrasi lokal harus memperhitungkan pengaruh budaya pada cara orang berpikir tentang demokrasi. Beberapa budaya mungkin memiliki tradisi partisipasi warga, ketika yang lain, orang mungkin lebih menghormati otoritas yang ditunjuk atau dipilih. Poin utamanya adalah, di tingkat lokal, praktik budaya yang mengakar kuat, seperti peran pemimpin tradisional, harus diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pemerintahan yang demokratis.¹²³

Contoh efektivitas tata kelola pemerintah lokal yang baik adalah gerakan kota hak asasi manusia yang belakangan ini muncul di seluruh dunia.¹²⁴ Sebuah kota HAM ditetapkan menjadi kotamadya ketika pemerintah daerah menanamkan Deklarasi Universal HAM dan standar dan/atau hukum hak asasi manusia internasional lainnya di setiap aspek kota melalui kebijakan dan program. Banyak kota telah memimpin dengan meratifikasi peraturan kota hak asasi manusia mereka sendiri dan/ atau berkomitmen untuk menjadi kota hak asasi manusia di Asia. Misalnya, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memiliki

jaringan kota hak asasi manusia.

Gerakan kota berdasarkan hak ini telah membuat PBB mengakui pemerintahan lokal dan HAM melalui adaptasi dari dua resolusi pada 2016 dan 2018¹²⁵. Banyak pemerintah daerah yang mengambil inisiatif langsung untuk mengakui hak asasi manusia sebagai tanggapan terhadap birokrasi pemerintah pusat dan memang, melalui kepemimpinan pemerintah daerah telah terjadi banyak peningkatan efisiensi dalam pemberian layanan kepada mereka yang rentan.

Konsep Kunci Demokrasi Lokal¹²⁶

| | |
|-------------------------------|---|
| Kewarganegaraan dan Komunitas | Partisipasi komunitas lokal adalah landasan dari gagasan modern tentang kewarganegaraan karena institusinya dan prosedur pengambilan keputusannya memungkinkan terbentuknya demokrasi yang lebih langsung di mana suara individu biasa dapat didengar dengan cara paling mudah. |
| Musyawarah | Demokrasi lebih dari sekadar pemilu. Ia melibatkan dialog, debat, dan diskusi yang bermakna dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Musyawarah mencakup lebih dari mendengarkan keluhan warga. Demokrasi yang benar-benar deliberatif adalah dialog memberi dan menerima di antara semua kelompok kepentingan dalam komunitas tentang keputusan dan tindakan utama yang mereka hadapi bersama. |

| | |
|--|--|
| Pendidikan Politik | Demokrasi lokal memfasilitasi “pendidikan politik”. Yaitu, partisipasi warga negara mengizinkan individu untuk memperoleh pengetahuan mengenai urusan komunitas jika tidak dalam wilayah yang sama dengan pejabat publik terpilih dan administrator kota profesional. Warga negara yang lebih berpengetahuan dan berpendidikan membuat demokrasi—pengambilan keputusan oleh rakyat—menjadi mungkin dan lebih efektif. Partisipasi adalah tentang menutup jarak antara “elit” politik dan anggota masyarakat. |
| Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kesejahteraan Sosial: | John Stuart Mill dan pendukung demokrasi partisipatoris lainnya di tingkat lokal berpendapat bahwa membuka kebajikan dan kecerdasan rakyat akan mendorong pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan baik antar warga, membangun komunitas yang mandiri dan berjiwa publik. |

Prinsip Inti dari Demokrasi Lokal¹²⁷

- Pelaksanaan kekuasaan secara penuh dan eksklusif: Sesuai dengan undang-undang, hak prerogatif otoritas lokal tidak boleh dirongrong di tingkat pusat atau daerah;
- Kompensasi keuangan yang sesuai: Di samping otonomi anggaran, pemerintah daerah harus menerima sumber daya

keuangan yang memadai sebanding dengan pelaksanaan pemerintahan, dan harus mengontrol sumber daya keuangan mereka sendiri, yang sebagian harus berasal dari pajak dan retribusi daerah;

- Pengawasan administratif yang ditentukan sendiri: Pengawasan administratif atas aktivitas otoritas lokal oleh badan lain hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum; dan Perlindungan hukum: Otoritas lokal dapat menggunakan upaya hukum untuk menjamin pelaksanaan kekuasaan mereka secara bebas dan menghormati prinsip-prinsip pemerintahansendiri di wilayah setempat.

Kesetaraan Gender dan Demokrasi

Kesetaraan gender adalah hal yang sangat krusial dalam masyarakat demokratis. Lembaga publik harus menyediakan layanan yang menyediakan layanan yang memajukan hak asasi perempuan dan laki-laki secara setara dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan khusus mereka. Pemberdayaan politik perempuan itu penting untuk menjamin keputusan yang diambil kredibel dan sah.

Kesetaraan gender bukan hanya sebuah hak asasi manusia yang fundamental, tapi juga sebuah fondasi yang penting untuk sebuah dunia yang damai, makmur, dan berkelanjutan. Sayangnya, di saat kami menulis ini, satu dari lima perempuan dan anak perempuan pada rentang usia 15-49 tahun dilaporkan telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh seorang pasangan yang intim dalam jangka waktu 12 bulan dan 49 negara saat ini

tidak memiliki hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan domestik.¹²⁹ Kemajuan sedang terjadi terkait praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) yang telah menurun hingga 30% dalam dekade terakhir, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghapus sepenuhnya praktik-praktik tersebut.¹³⁰

Menyediakan akses yang setara untuk perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perwakilan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi akan mendorong ekonomi berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Menerapkan sebuah kerangka hukum baru terkait kesetaraan perempuan di tempat kerja dan penghapusan praktik-praktik berbahaya yang menargetkan perempuan adalah hal penting untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender yang lazim di banyak negara di seluruh dunia.

Membongkar Gender: Apa itu Gender?

Gender adalah sebuah konstruksi sosial dan terdiri dari karakteristik feminitas dan maskulinitas. Karena individu tidak lahir dengan sebuah gender, gender adalah hal yang bisa berubah.

Gender merujuk kepada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial oleh masyarakat. Ini berhubungan dengan bagaimana kita dianggap dan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sebagai perempuan dan laki-laki berdasarkan cara masyarakat, bukan karena perbedaan

biologis. Pembagian kerja berdasarkan gender berbeda antar budaya dan terkadang dalam budaya itu sendiri, serta antara komunitas pedesaan dan perkotaan. Faktanya, kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan stereotip gender yang membantu membangun patriarki yang heteronormatif. Ini digunakan untuk menundukkan, mengontrol, mengatur dan membatasi peran, sumber daya, hak, dan kebebasan dari perempuan dan komunitas LGBTQI. Terlebih lagi, patriarki heteronormatif menstigmatisasi dan menghukum orang-orang yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan norma gender.

Gunakan kata, ‘gender’ adalah hal yang penting karena beberapa alasan:

Gender adalah hubungan yang dikonstruksi secara sosial antara perempuan dan laki-laki.

Hubungan yang dikonstruksi secara sosial bervariasi berdasarkan faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi.

Kebanyakan perbedaan yang diterima dalam peran, kewajiban, dan status antara perempuan dan laki-laki bukanlah hal yang “alami” atau biologis, tapi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan agama dari sebuah masyarakat.

Gender adalah perilaku yang dipelajari. Gagasan tentang apa perilaku yang benar, normal, dan sepantasnya untuk perempuan dan laki-laki berbeda antara bermacam budaya dan di dalam budaya itu sendiri.

Hubungan gender dalam suatu masyarakat bisa berubah.

Ini tergantung kepada perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama membuat perubahan menuju lebih baik, sehingga laki-laki dan perempuan dapat menikmati hak asasi manusia sepenuhnya.

Peringkat Kesetaraan Gender di Negara Asia-Pasifik Tahun 2019

| | | GLOBAL RANKINGS | | | | GLOBAL RANKINGS | |
|----|---------------|-----------------|------|------|---------------|-----------------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | SELANDIA BARU | 7 | 6 | 12 | BRUNEI | 90 | 95 |
| 2 | FILIPINA | 8 | 16 | 13 | NEPAL | 105 | 101 |
| 3 | LAOS | 26 | 43 | 14 | SRI LANKA | 100 | 102 |
| 4 | AUSTRALIA | 39 | 44 | 15 | FIJI | 106 | 103 |
| 5 | BANGLADESH | 48 | 50 | 16 | MALAYSIA | 101 | 104 |
| 6 | SINGAPURA | 67 | 54 | 17 | CHINA | 103 | 106 |
| 7 | THAILAND | 73 | 75 | 18 | KOREA SELATAN | 115 | 108 |
| 8 | MONGOLIA | 58 | 79 | 19 | INDIA | 108 | 112 |
| 9 | INDONESIA | 85 | 85 | 20 | MYANMAR | 88 | 114 |
| 10 | VIETNAM | 77 | 87 | 21 | TIMOR TIMUR | 124 | 117 |
| 11 | KAMBOJA | 93 | 89 | 22 | JEPANG | 110 | 121 |

the World Economic Forum webpage <https://www.weforum.org/>

Interseksionalitas

Latar Belakang

- Pengalaman seseorang mengenai diskriminasi tidak hanya berakar dari identitas gendernya, tapi juga tergantung pada multiplisitas dan 'interseksionalitas' dari identitas mereka.
- Interseksionalitas adalah tentang konvergensi identitas yang berbeda dalam satu orang.
- Interseksionalitas adalah tentang bagaimana identitas yang berbeda-beda ini memainkan dirinya dalam sebuah situasi.
- Interseksionalitas dapat berupa sebuah interseksi dari identitas istimewa dengan sumber penindasan.
- Interseksionalitas dapat berupa sebuah interseksi antara dua sumber nestapa.
- Identitas mungkin membawa keistimewaan di satu situasi dan tidak di situasi lain.

Singkatnya, analisis interseksionalitas menantang gagasan bahwa manusia hanya bisa memiliki satu identitas yang utama dan permanen di berbagai waktu. Manusia dapat memiliki beberapa identitas yang muncul dari keanggotaannya atau afliasinya dengan beberapa pengelompokan dalam masyarakat yang mana mungkin berdasarkan kategori gender, ras, usia, ekonomi, kelas sosial, dan kebangsaan, di antara yang lain. Di antara identitas-identitas inilah manusia menegosiasi kekuasaannya, hak istimewanya, dan posisinya di dalam masyarakat.

Partisipasi Politik Perempuan

Kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan

Perempuan mewakili setengah dari potensi bakat dan keterampilan umat manusia dan kurangnya representasi mereka dalam pengambilan keputusan merupakan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

- KTT Eropa pertama tentang Perempuan dalam Pengambilan Keputusan (Athena, 1992)

Dari tingkat lokal hingga global, kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan itu dilarang. Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih, juga di posisi untuk memimpin, baik itu di jabatan yang dipilih, pegawai negeri sipil, dan hak mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan yang demokratis.

Perempuan menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya, penghalang struktural melalui hukum diskriminatif dan lembaga yang masih membatasi pilihan perempuan untuk mencalonkan diri pada jabatan

tertentu. Demikian pula, kesenjangan kapasitas berarti perempuan lebih kecil kemungkinannya daripada laki-laki untuk memiliki pendidikan, kontak, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif.

Seperti catatan dari resolusi Majelis Umum PBB tahun 2011 tentang partisipasi politik perempuan:

Perempuan di setiap belahan dunia sebagian besar terus terpinggirkan dari ranah politik, seringkali sebagai akibat dari undang-undang, praktik, sikap dan stereotip gender yang diskriminatif, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan efek kemiskinan yang tidak proporsional pada perempuan.¹³⁵

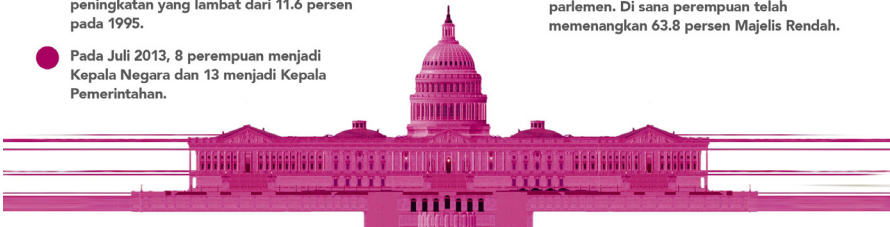
Perempuan individu telah mengatasi hambatan ini untuk mendapatkan pujian besar, dan seringkali untuk kepentingan masyarakat luas. Namun bagi perempuan secara keseluruhan, wahana ini harus setara dan membuka peluang bagi semua pihak.

Partisipasi Politik Perempuan¹³⁶

● Hanya 20.9 persen perempuan yang merupakan anggota parlemen pada 1 Juli 2013, peningkatan yang lambat dari 11.6 persen pada 1995.

● Pada Juli 2013, 8 perempuan menjadi Kepala Negara dan 13 menjadi Kepala Pemerintahan.

● Rwanda memiliki angka tertinggi di dunia untuk perempuan yang menjadi anggota parlemen. Di sana perempuan telah memenangkan 63.8 persen Majelis Rendah.



Kepemimpinan dan Partisipasi:

● Pada Januari 2012, hanya 17 persen menteri pemerintahan yang merupakan perempuan.

● Di Norwegia, ditemukan sebuah hubungan sebab-akibat langsung antara kehadiran perempuan dalam dewan-dewan kota dan biaya bantuan perawatan anak.

● Perwakilan perempuan dalam pemerintahan lokal telah membuat sebuah perbedaan. Penelitian tentang panchayat (dewan lokal) di India menemukan bahwa jumlah proyek air minum di daerah dengan dewan pimpinan perempuan adalah 62 persen.

